



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

MATRIKS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2032, Gubernur selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah menetapkan Matrik Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil Sidang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 April 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Matrik Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 48);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 610/7/2011 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG MATRIKS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi :
 - a. pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan; dan
 - b. acuan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap kegiatan yang terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkoordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah untuk dibahas dalam Sidang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dan difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari materi laporan tahunan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah, serta menjadi arahan untuk penyempurnaan rencana kerja atau kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,
ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 41.

Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
I	Kebijakan Umum						
1.	Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						
a.	Menyelesaikan penyusunan Pola Pengelolaan SDA semua Wilayah Sungai (WS)	2013	Dinas PSDA	1) Menyelesaikan Pola Pengelolaan SDA WS kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Dokumen Pola Pengelolaan SDA pada WS kewenangan Provinsi Jawa Tengah	Meningkatnya sinergitas Pengelolaan SDA WS di Provinsi Jawa Tengah	
2013		2) Mendukung penyelesaian Pola Pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat di Provinsi Jawa Tengah		Dokumen Pola Pengelolaan SDA pada WS kewenangan Pusat di Provinsi Jawa Tengah			
2015		3) Melaksanakan diskusi dengan Pemkab Kab. Jepara tentang kewenangan pengelolaan WS Karimunjawa dan WS Wiso Gelis		Tercapainya kesepakatan kewenangan pengelolaan WS Karimunjawa & WS Wisogelis			
2015		4) Melaksanakan diskusi dengan Pemkab Kab. Jepara dalam rangka membantu menyelesaikan Pola pengelolaan SDA WS Karimunjawa dan WS Wiso Gelis		Terselesainya dokumen Pola Pengelolaan WS Karimunjawa & WS Wisogelis			
s/d 2015		Bappeda	Berperanserta dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA WS pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Terwujudnya peranserta dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA WS pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)			
		Badan Lingkungan Hidup	Menyampaikan masukan tentang kualitas air yang menjadi kewenangannya dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampainya masukan tentang kualitas air yang menjadi kewenangannya dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA			
		Dinas Pertanian TP&H	1) Menyampaikan masukan tentang kebutuhan air untuk komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura sektor pertanian untuk pemantapan produksi dan pengamanan Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Mengembangkan kawasan pertanian dengan keterpaduan sentra-sentra produksi pertanian dalam suatu pola Pengelolaan Sumber Daya Air	Tersampainya masukan tentang kebutuhan air untuk komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk pemantapan produksi dan pengamanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Terwujudnya kawasan pertanian dengan keterpaduan sentra-sentra produksi pertanian dalam suatu pola Pengelolaan Sumber Daya Air			
Dinas Kesehatan	1) Menyampaikan masukan tentang kualitas air untuk air minum dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA 2) Menyampaikan masukan tentang kebutuhan air sektor kesehatan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampainya masukan tentang kualitas air untuk air minum dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA Tersampainya masukan tentang kebutuhan air sektor kesehatan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA					
Dinas Kehutanan	Menyampaikan masukan tentang potensi dan perlindungan SDA di kawasan hutan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampainya masukan tentang potensi dan perlindungan SDA di kawasan hutan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA					

140	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Menyampaikan masukan tentang kebutuhan dan pengembangan transportasi air dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampainya masukan tentang kebutuhan dan pengembangan transportasi air dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA		
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Menyampaikan masukan tentang proyeksi kebutuhan air sektor industri di dalam dan di luar kawasan industri dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampainya masukan tentang proyeksi kebutuhan air sektor industri di dalam dan di luar kawasan industri dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyampaikan masukan tentang pengelolaan air tanah dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampainya masukan tentang pengelolaan air tanah dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Menyampaikan masukan tentang luasan lahan untuk sektor budidaya perikanan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampainya masukan tentang luasan lahan untuk sektor budidaya perikanan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA		
			Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Menyampaikan diseminasi informasi curah hujan dan peringatan dini cuaca / iklim ekstrim sebagai masukan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA	Tersampainya informasi curah hujan dan peringatan dini cuaca / iklim ekstrim sebagai masukan dalam penyusunan Pola Pengelolaan SDA		
u	Mengoptimalkan dan memfasilitasi Dewan SDA Provinsi Jawa Tengah dan melaksanakan pendampingan pembentukan Dewan SDA Kabupaten	Menerus 2015 s/d 2015	Dinas PSDA	1) Melaksanakan optimalisasi dan fasilitasi Dewan SDA Provinsi Jawa Tengah 2) Melaksanakan pendampingan dalam pembentukan Dewan SDA Kabupaten	Terfasilitasinya kegiatan Dewan SDA Provinsi Terlaksananya pendampingan dalam pembentukan Dewan SDA Kabupaten	Meningkatnya sinergitas Pengelolaan SDA WS di Provinsi Jawa Tengah	
			Dewan SDA Provinsi	Berperanserta dalam pembentukan Dewan SDA Kabupaten	Terwujudnya peranserta dalam pembentukan Dewan SDA Kabupaten		
c	Mengoptimalkan dan memfasilitasi fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) WS Kewenangan Provinsi serta membantu pembentukan TKPSDA WS kewenangan Kabupaten/Kota (TKPSDA WS Karimunjawa dan Wiso Gelis)	Menerus 2015 s/d 2015	Dinas PSDA	1) Melaksanakan optimalisasi dan fasilitasi TKPSDA WS Kewenangan Provinsi 2) Membantu pembentukan TKPSDA WS Karimunjawa dan TKPSDA WS Wiso Gelis	Terfasilitasinya kegiatan TKPSDA WS Bodri Kuto Terbentuknya TKPSDA WS Karimunjawa dan WS Wiso Gelis	Meningkatnya sinergitas Pengelolaan SDA WS kewenangan Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah	
			Dewan SDA Provinsi	Berperanserta dalam pembentukan TKPSDA WS Karimunjawa dan TKPSDA WS Wiso Gelis	Terwujudnya peranserta dalam pembentukan TKPSDA WS Karimunjawa dan TKPSDA WS Wiso Gelis		
d	Memberikan dukungan sumber daya untuk memperkuat peran TKPSDA WS di Jawa Tengah terhadap sinkronisasi program pengelolaan SDA lintas sektor, lintas Provinsi, lintas Kabupaten/Kota dan dalam satu Kabupaten/Kota	Menerus	Dinas PSDA	Mendukung sumber daya untuk memperkuat peran TKPSDA WS di Jawa Tengah terhadap sinkronisasi program pengelolaan SDA lintas sektor, lintas provinsi, lintas kabupaten/kota dan dalam satu kabupaten/kota	Meningkatnya peran TKPSDA WS di Jawa Tengah dalam sinkronisasi program pengelolaan SDA lintas sektor, lintas provinsi, lintas kabupaten/kota dan dalam satu kabupaten/kota		
			Badan Lingkungan Hidup	Mendukung program di setiap Pusat Pengelolaan Ekoregion untuk memperkuat peran TKPSDA WS	Terwujudnya dukungan program di setiap Pusat Pengelolaan Ekoregion untuk memperkuat peran TKPSDA WS		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Mendukung program pengelolaan air tanah untuk memperkuat peran TKPSDA WS	Terwujudnya dukungan program pengelolaan air tanah untuk memperkuat peran TKPSDA WS		
			Dinas Kehutanan	Mengkoordinasikan dan mendukung program pengelolaan kawasan hutan untuk memperkuat peran TKPSDA WS	Terkoordinasi dan terwujudnya program pengelolaan kawasan hutan untuk memperkuat peran TKPSDA WS	Terwujudnya sinkronisasi program pengelolaan SDA lintas sektor lintas provinsi, lintas kabupaten/kota dan dalam satu kabupaten/kota	
			Dinas Pertanian TP&H	Menyusun program Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berbasis pengelolaan Sumberdaya yang lestari untuk memperkuat peran TKPSDA WS	Tersusunnya program Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berbasis pengelolaan Sumberdaya yang lestari untuk memperkuat peran TKPSDA WS		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Mengkoordinasikan dan melaksanakan program pengelolaan budidaya perikanan untuk memperkuat peran TKPSDA WS	Terkoordinasi dan terlaksananya program pengelolaan budidaya perikanan untuk memperkuat peran TKPSDA WS		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
2.	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya Terkait Air						
a	Membangkitkan dan membangun perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melalui pendidikan formal dan nonformal oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha	s/d 2031	Dinas PSDA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun materi perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air untuk pendidikan formal dan non formal 2) Melaksanakan sosialisasi/workshop/seminar/diskusi tentang perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air dengan melibatkan pemerintah-masyarakat-dunia usaha 	<p>Tersusunnya materi perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air untuk pendidikan formal dan non formal</p> <p>Tertaksananya sosialisasi/workshop/seminar/ diskusi tentang perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air dengan melibatkan pemerintah-masyarakat-dunia usaha</p>	Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang perilaku menjunjung tinggi nilai dan manfaat air sejak usia dini	
	Badan Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pelatihan teknis pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 2) Melakukan survey perilaku ramah lingkungan 3) Memberikan apresiasi terhadap pendidikan lingkungan hidup yang diselenggarakan di sekolah, pelaku usaha dan masyarakat 	<p>Tertaksananya pelatihan teknis pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air</p> <p>Tertaksananya survey perilaku ramah lingkungan</p> <p>Diterimanya apresiasi terhadap pendidikan lingkungan hidup, yang diselenggarakan di sekolah, pelaku usaha dan masyarakat</p>			
	Dinas Pertanian TP&H		<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas kelembagaan Petani Pemakai Air dan Petani Pemakai Air Tanah melalui Pelatihan dan Penguatan lainnya 2) Meningkatkan partisipasi petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di Tingkat Usaha Tani 3) Meningkatkan motivasi dan dorongan Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A melalui Lomba P3A dan GP3A Tingkat Provinsi 4) Melaksanakan Sekolah Lapang (Sekolah Lapang Intensifikasi / SLI, System Rice Intensification / SRI, Konservasi, Sekolah Lapang Pertanian Hortikultura dan Tanaman / SLPHT, Sekolah Lapang Pertanian / SLPTT) 5) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Petani Pemakai Air dan Petani Pemakai Air Tanah di Jawa Tengah 	<p>Meningkatnya kualitas kelembagaan Petani Pemakai Air dan Petani Pemakai Air Tanah melalui Pelatihan dan Penguatan lainnya</p> <p>Meningkatnya partisipasi petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di Tingkat Usaha Tani</p> <p>Meningkatnya motivasi dan dorongan Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A melalui Lomba P3A dan GP3A Tingkat Provinsi</p> <p>Tertaksananya Sekolah Lapang (Sekolah Lapang Intensifikasi / SLI, System Rice Intensification / SRI, Konservasi, Sekolah Lapang Pertanian Hortikultura dan Tanaman / SLPHT, Sekolah Lapang Pertanian / SLPTT)</p> <p>Tertaksananya pembinaan dan pemberdayaan Petani Pemakai Air dan Petani Pemakai Air Tanah di Jawa Tengah</p>			
	Dinas Kesehatan		<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun materi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan terkait air 2) Mengembangkan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan terkait air 	<p>Tersusunnya materi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan terkait air</p> <p>Tertaksananya pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan terkait air</p>			
	Dinas Kehutanan		Menyusun materi perilaku masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal	Tersedianya materi perilaku masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal			
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Menyusun materi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal di bidang air tanah	Tersedianya materi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan formal dan non formal di bidang air tanah			
	Dinas Pendidikan		Memfasilitasi "pembudayaan" nilai dan etika pendayagunaan sumber daya air bagi kehidupan melalui jalur pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersosialisasinya nilai dan etika pendayagunaan sumber daya air bagi kehidupan kepada pendidik dan peserta didik 2) Terintegrasinya nilai dan etika pendayagunaan sumber daya air bagi kehidupan pada mata pelajaran yang relevan 			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Kehutanan	Melaksanakan inventarisasi keberadaan hak ulayat MHA atas SDA dalam kawasan hutan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan daerah	Terlaksananya inventarisasi keberadaan hak ulayat MHA atas SDA dalam kawasan hutan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan daerah		
3.	Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan SDA						
a.	Meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan SDA		Dinas PSDA	Memotivasi dunia usaha dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan SDA	Termotivasinya dunia usaha dan masyarakat dalam berkontribusi untuk pengelolaan SDA	Terwujudnya peningkatan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan SDA	
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan penyusunan dan sosialisasi kebijakan dan pedoman pembayaran jasa lingkungan terkait SDA	Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi kebijakan dan pedoman pembayaran jasa lingkungan terkait SDA		
			Dinas Pertanian TP&H	1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat pertanian menuju kemandirian usaha untuk berkontribusi dalam pengelolaan SDA 2) Mengembangkan usaha agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk meningkatkan kontribusi petani dalam pengelolaan SDA	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat pertanian menuju kemandirian usaha untuk berkontribusi dalam pengelolaan SDA Berkembangnya usaha agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk meningkatkan kontribusi petani dalam pengelolaan SDA		
			Dinas Kehutanan	Memotivasi dunia usaha kehutanan dan masyarakat kawasan hutan untuk berkontribusi dalam pengelolaan SDA	Termotivasinya dunia usaha kehutanan dan masyarakat kawasan hutan untuk berkontribusi dalam pengelolaan SDA		
			Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan peranserta dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan SDA untuk transportasi air	Meningkatnya peranserta dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan SDA untuk transportasi air		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatkan kepedulian dunia usaha dan masyarakat dalam berkontribusi untuk konservasi air tanah	Meningkatnya kepedulian dunia usaha dan masyarakat dalam berkontribusi untuk konservasi air tanah		
b.	Mengupayakan hasil penerimaan dari biaya jasa pengelolaan (BJP) sumber daya air (SDA) dari penerima manfaat secara bertahap untuk membiayai pengelolaan SDA		Dinas PSDA	1) Melaksanakan kajian pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di tingkat WS Kewenangan Provinsi termasuk perhitungan nilai perolehan air untuk penetapan BJP SDA 2) Menyiapkan pembentukan BLU	Hasil kajian pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di WS Kewenangan Provinsi Terbentuknya BLU	Terwujudnya peningkatan hasil penerimaan dari BJP SDA secara bertahap untuk membiayai pengelolaan SDA	
			Dinas Kehutanan	Mengupayakan alokasi sebagian pembiayaan pengelolaan hutan dari komponen Biaya Jasa Pengelolaan (BJP) SDA	Tersedianya alokasi sebagian pembiayaan pengelolaan hutan dari komponen Biaya Jasa Pengelolaan (BJP) SDA		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menerapkan pedoman perhitungan nilai perolehan air tanah untuk penetapan BJP SDA	Diterapkannya pedoman perhitungan nilai perolehan air tanah untuk penetapan BJP SDA		
c.	Memanfaatkan hasil penerimaan BJP SDA secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan setelah terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	2 thn stlh BLU terbentuk	Dinas PSDA	1) Menyiapkan peraturan perundang-undangan daerah terkait perhitungan nilai perolehan air 2) Menyusun, menetapkan dan menerapkan Prosedur Operasi Standar penerimaan dan penggunaan BJP SDA secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan 3) Operasionalisasi BLUD	Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah tentang perhitungan nilai perolehan air Tersusun, ditetapkan dan diterapkannya Prosedur Operasi Standar penerimaan dan penggunaan BJP SDA secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan Beroperasinya BLUD	Terwujudnya pemanfaatan hasil penerimaan BJP SDA secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkesinambungan	
			Dinas Kehutanan	Menyusun, menetapkan, dan menerapkan Prosedur Operasi Standar penerimaan dan penggunaan BJP SDA untuk pengelolaan hutan	Ditetapkan dan diterapkannya Prosedur Operasi Standar penerimaan dan penggunaan BJP SDA untuk pengelolaan hutan		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyusun, menetapkan, dan menerapkan Prosedur Operasi Standar penerimaan dan pemanfaatan BJP SDA terkait air tanah	Ditetapkan dan diterapkannya Prosedur Operasi Standar penerimaan dan pemanfaatan BJP SDA terkait air tanah		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
4.	Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum						
a.	Mempercepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pengawasan bidang SDA pada WS	2013	Dinas PSDA	Merekrut PPNS dan atau mengikut sertakan PNS dari lingkungan Dinas PSDA untuk mengikuti pendidikan PPNS dalam rangka pengawasan bidang SDA pada WS kewenangan Provinsi	Tersedianya PPNS yang cukup dalam rangka pengawasan bidang SDA pada WS kewenangan Provinsi	Tertindakannya penegakan hukum dalam bidang SDA pada WS di Provinsi Jawa Tengah	
Badan Lingkungan Hidup			Meningkatkan pembinaan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA terkait lingkungan hidup	Meningkatnya pembinaan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA terkait lingkungan hidup			
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika			Meningkatkan pembinaan PPNS angkutan air dalam penegakan hukum bidang SDA	Meningkatnya pembinaan PPNS angkutan air dalam penegakan hukum bidang SDA			
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			Meningkatkan pembinaan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA terkait air tanah	Meningkatnya pembinaan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA terkait air tanah			
			Dinas Pertanian TP&H	Meningkatkan pembinaan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA terkait budidaya pertanian dan alih fungsi lahan sawah lestari	Meningkatnya pembinaan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA terkait budidaya pertanian dan alih fungsi lahan sawah lestari		
b.	Mengoptimalkan peran Satpol PP dalam Penegakan Hukum Bidang SDA pada WS di Provinsi Jawa Tengah	Mulai 2014	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan peran Penegakan Hukum Bidang SDA pada WS di Provinsi Jawa Tengah	Meningkatnya peran Penegakan Hukum Bidang SDA pada WS di Provinsi Jawa Tengah	Terwujudnya penegakan hukum bidang SDA pada WS di Provinsi Jawa Tengah	
Dinas Kehutanan			Meningkatkan peran polisi hutan dalam rangka membantu Satpol PP dalam Penegakan Hukum Bidang SDA dikawasan hutan	Meningkatnya peran polisi hutan dalam rangka membantu Satpol PP dalam Penegakan Hukum Bidang SDA dikawasan hutan			
c.	Mengoptimalkan program penegakan hukum bidang SDA pada WS di Provinsi Jawa Tengah	Mulai 2013	Satuan Polisi Pamong Praja	Menyusun program penegakan hukum bidang SDA pada WS di Provinsi Jawa Tengah	Tersusunnya program penegakan hukum bidang SDA pada WS di Provinsi Jawa Tengah		
Dinas Kehutanan			Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan polisi hutan dalam penegakan hukum bidang SDA dikawasan hutan pada WS di Provinsi Jawa Tengah	Terkoordinasinya penyusunan program dan kegiatan penegakan hukum bidang SDA dikawasan hutan pada WS di Provinsi Jawa Tengah			

Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
Kebijakan Peningkatan Konservasi SDA Secara Terus Menerus						
Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air						
<p>1. Menjaga daerah tangkapan air dan menjaga fungsinya serta fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan SDA pada setiap wilayah sungai di Provinsi Jawa Tengah oleh semua pemilik kepentingan, antara lain:</p> <p>2. Meningkatkan pengendalian budi daya pertanian terutama di daerah hulu sesuai dengan kemiringan lahan dan kaidah konservasi tanah dan air</p>						
	Menerus	Dinas Pertanian TP&H	Melakukan pembinaan teknis terkait budidaya pertanian sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air	Terlaksananya pembinaan teknis terkait budidaya pertanian sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air	Terwujudnya peningkatan budidaya pertanian sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air	
		Dinas Kehutanan	Melakukan pembinaan teknis terkait budidaya tanaman sesuai kaidah konservasi tanah dan air kepada masyarakat dikawasan hutan dan sekitarnya sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air	Terlaksananya pembinaan teknis terkait budidaya tanaman sesuai kaidah konservasi tanah dan air kepada masyarakat dikawasan hutan dan sekitarnya sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air		
		Dinas Perkebunan	Melakukan pembinaan teknis terkait budidaya tanaman perkebunan kepada masyarakat dikawasan perkebunan dan sekitarnya	Terlaksananya pembinaan teknis terkait budidaya tanaman perkebunan kepada masyarakat dikawasan perkebunan dan sekitarnya		
		Dinas PSDA	Melakukan pembinaan teknis terkait konservasi tanah dan air disekitar sumber air	Terlaksananya pembinaan teknis terkait konservasi tanah dan air disekitar sumber air		
		Badan Koordinasi Penyuluh	Melakukan penyuluhan, penguatan kelembagaan, peningkatan SDM penyuluh untuk budidaya pertanian, tanaman hutan dan tanaman perkebunan sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air	Terlaksananya penyuluhan, penguatan kelembagaan, peningkatan SDM penyuluh untuk budidaya pertanian, tanaman hutan dan tanaman perkebunan sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air		
<p>3. Meningkatkan tampungan air dengan membangun lebih banyak waduk, embung, sumur resapan, kolam retensi dan mengendalikan ruang terbuka hijau</p>						
	Menerus	Dinas PSDA	a) Merencanakan dan membangun waduk, embung, sumur resapan, kolam retensi guna mengurangi kawasan rawan kekeringan dan banjir b) Melaksanakan pengerukan sedimentasi rawa pening berdasarkan data dan informasi mengenai kebutuhan air untuk budidaya perikanan, pertanian, pariwisata, energi dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup	Terbangunnya waduk, embung, sumur resapan, kolam retensi Terlaksananya pengerukan sedimentasi rawa pening berdasarkan data dan informasi mengenai kebutuhan air untuk budidaya perikanan, pertanian, pariwisata, energi dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup	Terwujudnya peningkatan tampungan air guna mendukung konservasi SDA	
		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Mengendalikan ruang terbuka hijau dan merencanakan serta membangun kolam retensi pada kawasan perkotaan	Terkendalinya ruang terbuka hijau dan merencanakan serta membangun kolam retensi pada kawasan perkotaan		
		Bappeda	Mengkoordinasikan dan mensinergikan penyusunan rencana pembangunan terkait dengan pengembangan tampungan air	Terlaksananya koordinasi dan sinergi penyusunan rencana pembangunan terkait dengan pengembangan tampungan air		
		Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan model percontohan pembangunan sumur resapan dan penanaman pohon	Terlaksananya model percontohan pembangunan sumur resapan dan penanaman pohon		
		Dinas Kehutanan	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sipil teknik berupa pembangunan dam pengendali, sumur resapan, biopori, dan rorak di kawasan hutan	Terkoordinasikan dan terlaksananya kegiatan sipil teknik berupa pembangunan dam pengendali, sumur resapan, biopori, rorak di kawasan hutan		
		Dinas Pertanian TP&H	Melaksanakan pengembangan tampungan air di lahan pertanian	Terlaksananya pengembangan tampungan air di lahan pertanian		
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyusun, menetapkan pedoman teknis dan melaksanakan pembuatan sumur resapan guna meningkatkan potensi air tanah	Tersusunnya penetapan pedoman teknis dan pelaksanaan pembuatan sumur resapan guna meningkatkan potensi air tanah		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Menyediakan data dan informasi mengenai luasan lahan untuk budidaya perikanan di perairan umum sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Tersedianya data dan informasi mengenai luasan lahan untuk budidaya perikanan di perairan umum sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Meningkatkan penyediaan informasi curah hujan dan membangun atau menambah jaringan pengamatan curah hujan pada kawasan yang memiliki potensi pengembangan tampungan air	Tersedianya informasi curah hujan pada kawasan yang memiliki potensi pengembangan tampungan air		
			Dinas Perkebunan	Pengembangan tampungan air, embung, sumur resapan di luar kawasan hutan	Terlaksananya pengembangan tampungan air, embung, sumur resapan di luar kawasan hutan		
3)	Mengendalikn alih fungsi hutan dan lahan untuk mencegah penurunan fungsi resapan air, dari pembangunan permukiman, perkotaan, dan industri	Menerus	Badan Pertanahan Nasional	Melaksanakan pembinaan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi resapan air, dari pembangunan permukiman, perkotaan dan industri	Terlaksananya pembinaan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi resapan air, dari pembangunan permukiman, perkotaan dan industri	Terkendalinya alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman, perkotaan, dan industri untuk mencegah penurunan fungsi resapan air	
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pembinaan teknis dalam mencegah penurunan fungsi resapan air	Terlaksananya pembinaan teknis dalam mencegah penurunan fungsi resapan air			
		Dinas Kehutanan	Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya (fungsi lindung, konservasi dan produksi)	Terlaksananya pembinaan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya (fungsi lindung, konservasi dan produksi)			
		Dinas Pertanian TP&H	Melaksanakan perencanaan dan perlindungan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna kemandirian pangan dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan dan menurunnya fungsi resapan air	Terlaksananya perencanaan dan perlindungan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna kemandirian pangan dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan dan menurunnya fungsi resapan air			
		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan pelaksanaan peraturan gubernur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap alih fungsi lahan untuk permukiman, perkotaan dan industri	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penerapan pelaksanaan peraturan gubernur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap alih fungsi lahan untuk permukiman, perkotaan dan industri			
4)	Menentukan zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah yang hasilnya dapat diakses oleh masyarakat dan sebagai salah satu dasar penyusunan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan	2 tahun setelah Perpres Cekungan Air Tanah (CAT) ditetapkan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	a) Melakukan kajian Zona Imbuhan dan Zona Pemanfaatan Air Tanah khususnya pada kawasan zona rawan, zona kritis dan zona rusak air tanah untuk kepentingan masyarakat b) Melakukan pengendalian pengambilan air tanah melalui pemberian rekomendasi teknis untuk perijinan secara selektif sesuai dengan potensi ketersediaan air tanah	Tersusunnya hasil kajian Zona Imbuhan dan Zona Pemanfaatan Air Tanah khususnya pada kawasan zona rawan, zona kritis, dan zona rusak air tanah untuk kepentingan masyarakat Terlaksananya pengendalian pengambilan air tanah melalui pemberian rekomendasi teknis untuk perijinan secara selektif sesuai dengan potensi ketersediaan air tanah	Terwujudnya zona imbuhan, zona pengambilan air tanah, pemberian izin pemanfaatan air tanah dan pembangunan sumur imbuhan untuk pengendalian pengambilan air tanah	
		Dinas PSDA	Melaksanakan pembangunan sumur imbuhan pada kawasan irigasi air tanah	Terlaksananya pembangunan sumur imbuhan pada kawasan irigasi air tanah			
		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Melaksanakan pengendalian kawasan imbuhan dari pengembangan kawasan permukiman	Terlaksananya pengendalian kawasan imbuhan dari pengembangan kawasan permukiman			
5)	Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai (DAS) yang dipulihkan daya dukungnya dilakukan secara partisipatif dan terpadu	5 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Dinas Kehutanan	a) Mengkoordinasikan dan Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai (DAS) yang dipulihkan daya dukungnya secara partisipatif dan terpadu b) Mengkoordinasikan dan Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai (DAS) Citanduy untuk konservasi segara anak-anak c) Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS di Provinsi Jawa Tengah sesuai yang diamanatkan pada PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Terkoordinasi dan Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai (DAS) yang dipulihkan daya dukungnya secara partisipatif dan terpadu Terkoordinasi dan terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai (DAS) Citanduy untuk konservasi segara anak-anak Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS di Provinsi Jawa Tengah sesuai yang diamanatkan pada PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Berkurangnya lahan kritis pada 6 DAS Superprioritas 9 DAS Prioritas secara partisipatif dan terpadu	

Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
		Badan Lingkungan Hidup	a) Melaksanakan pembinaan teknis mengenai kelestarian lingkungan di wilayah DAS prioritas b) Melaksanakan inventarisasi tutupan lahan untuk menentukan status kerusakan hutan dan lahan di DAS	Terlaksananya pembinaan teknis mengenai kelestarian lingkungan di wilayah DAS prioritas Terlaksananya inventarisasi tutupan lahan untuk menentukan status kerusakan hutan dan lahan di DAS		
		Dinas Pertanian TP&H	a) Melaksanakan pembinaan usaha tani konservasi melalui pola tanam untuk mendukung rehabilitasi dan konservasi lahan b) Melindungi LP2B dari alih fungsi lahan di luar kepentingan umum dan mencegah penurunan fungsi resapan air	Terlaksananya pembinaan usaha tani konservasi melalui pola tanam untuk mendukung rehabilitasi dan konservasi lahan Terlindunginya LP2B dari alih fungsi lahan di luar kepentingan umum dan mencegah penurunan fungsi resapan air		
		Dinas PSDA	a) Melaksanakan percontohan dan pengembangan konservasi lahan dan air secara terpadu berbasis masyarakat b) Melaksanakan percontohan dan pengembangan konservasi lahan dan air secara terpadu berbasis masyarakat pada 6 DAS super prioritas dan DAS Citanduy	Terlaksananya percontohan dan pengembangan konservasi lahan dan air secara terpadu berbasis masyarakat Terlaksananya percontohan dan pengembangan konservasi lahan dan air secara terpadu berbasis masyarakat pada 6 DAS super prioritas dan DAS Citanduy		
		Dinas Perkebunan	Pengembangan usaha tani konservasi lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk	Terlaksananya usaha tani konservasi lahan kritis dengan diversifikasi tanaman tahunan		
6) Menambah luas lahan dengan penutupan vegetasi yang cukup dan mempunyai fungsi yang sama dengan hutan pada DAS atau pulau yang mempunyai luas kawasan hutan dengan fungsi optimal kurang dari 30% untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan		Menerus	a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi luas kawasan hutan dan penutupan vegetasi pada DAS atau pulau b) Memfasilitasi pengembangan hutan rakyat dan penghijauan untuk menambah luas lahan dengan penutupan vegetasi yang cukup dan mempunyai fungsi yang sama dengan hutan c) Mengkoordinasikan dan melaksanakan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan	Terkoordinasi dan terlaksananya inventarisasi luas kawasan hutan dan penutupan vegetasi pada DAS atau pulau Terfasilitasinya pengembangan hutan rakyat dan penghijauan untuk menambah luas lahan dengan penutupan vegetasi yang cukup dan mempunyai fungsi yang sama dengan hutan Terkoordinasi dan terlaksananya reboisasi dan rehabilitasi hutan	Terwujudnya luas kawasan hutan dan penutupan vegetasi minimal 30% pada DAS atau pulau	
		Dinas PSDA	Melaksanakan penambahan luas kawasan hutan yang berasal dari kawasan perlindungan setempat (daerah sempadan pantai, sungai, saluran irigasi, danau, embung, waduk, mata air)	Terlaksananya penambahan luas kawasan hutan yang berasal dari kawasan perlindungan setempat		
		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Melaksanakan penambahan luas kawasan hutan yang berasal dari kawasan ruang terbuka hijau kota	Terlaksananya penambahan luas kawasan hutan yang berasal dari kawasan ruang terbuka hijau kota		
		Dinas Perkebunan	Melaksanakan optimasi pemanfaatan lahan dengan budidaya tanaman perkebunan yang sesuai dengan topografi setempat	Terlaksananya optimasi pemanfaatan lahan dengan budidaya tanaman perkebunan yang sesuai dengan topografi setempat		
7) Menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi kawasan lindung		Menerus	Mengkoordinasikan Pengelolaan Kawasan yang mempunyai fungsi lindung kawasan melalui pengendalian perijinan	Terkoordinasinya Pengelolaan Kawasan yang mempunyai fungsi lindung kawasan melalui pengendalian perijinan	Terjaganya fungsi lindung kawasan	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Menjaga fungsi lindung kawasan melalui pengendalian perijinan pemanfaatan pantai terkait terumbu karang, TKB dan transplantasi	Terjaganya fungsi lindung kawasan melalui pengendalian perijinan pemanfaatan pantai terkait terumbu karang, TKB dan transplantasi		
		Badan Lingkungan Hidup	Menjaga fungsi lindung kawasan melalui melalui studi AMDAL	Terjaganya fungsi lindung kawasan melalui melalui studi AMDAL		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
b	Meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan pengisian air pada sumber air antara lain untuk meningkatkan ketersediaan air baku sekurang-kurangnya 69% pada tahun 2015 dengan cara :						
	1) Meningkatkan perlindungan dan pelestarian sumber air dan lahan, terutama yang berada di kawasan permukiman	Menerus	Dinas PSDA	<p>Metakukan perlindungan melalui pengaturan, pencegahan dan pengendalian terhadap pembangunan fisik pada sumber air dan pemanfaatan sumber air serta lahan melalui kegiatan:</p> <p>a) Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah tentang garis sempadan sumber air</p> <p>b) Penetapan sempadan sumber air pada WS Kewenangan Provinsi</p> <p>c) Pelaksanaan penertiban dan pengawasan penggunaan sempadan sumber air bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>d) Pembangunan prasarana pelindung sempadan sumber air pada lokasi yang memerlukan</p>	<p>Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah tentang garis sempadan sumber air</p> <p>Ditetapkannya sempadan sumber air pada WS Kewenangan Provinsi</p> <p>Dilaksanakannya penertiban dan pengawasan penggunaan sempadan sumber air bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Terbangunnya prasarana pelindung sempadan sumber air pada lokasi yang memerlukan</p>	Terlindungnya Sumber Air dan Lahan terutama yang berada di kawasan permukiman	
		Badan Lingkungan Hidup	<p>Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air dan kegiatan industri dan komersial lainnya, kegiatan usaha skala kecil, domestik dan jasa melalui kegiatan</p> <p>a) Penyediaan informasi DayaTampung Beban Pencemaran (DTBP) sungai terutama sungai-sungai kritis</p> <p>b) Penyusunan baku mutu air limbah berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan industri, prasarana dan jasa</p> <p>c) Penyusunan pedoman teknis penjinan pengelolaan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan industri, prasarana dan jasa</p> <p>d) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan industri, prasarana dan jasa</p> <p>e) Pengembangan percontohan pengendalian pencemaran air</p> <p>f) Penetapan standar pelayanan minimal kabupaten/kota untuk perlindungan sumber air (sungai, danau, rawa, estuari, waduk)</p>	<p>Tersedianya informasi DayaTampung Beban Pencemaran (DTBP) sungai terutama sungai-sungai kritis.</p> <p>Tersusunnya baku mutu air limbah berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan industri, prasarana dan jasa</p> <p>Tersusunnya pedoman teknis penjinan pengelolaan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan industri, prasarana dan jasa</p> <p>Terlaksananya pengawasan, pembinaan dan pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan industri, prasarana dan jasa</p> <p>Terlaksananya pengembangan percontohan pengendalian pencemaran air</p> <p>Ditetapkannya standar pelayanan minimal kabupaten/kota untuk perlindungan sumber air (sungai, danau, rawa, estuari, waduk)</p>			
		Dinas Pertanian TP&H	Meningkatkan pembinaan terhadap kegiatan usaha tani konservasi untuk melindungi sumber air pada lahan pertanian	Meningkatnya pembinaan terhadap kegiatan usaha tani konservasi untuk melindungi sumber air pada lahan pertanian			
		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Melaksanakan strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kepada para pemilik kepentingan	Tertersusunnya strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kepada para pemilik kepentingan			
		Dinas Kesehatan	Melaksanakan strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada masyarakat dan lingkungan sekolah	Tertersusunnya strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada masyarakat dan lingkungan sekolah			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Kehutanan / Perum Perhutani / BTN dan BKSDA	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air serta pemanfaatan sumber air dan lahan di kawasan hutan lindung b) Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan c) Memberi masukan terhadap pengaturan pemanfaatan air dan energi air pada kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung. 	<p>Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air serta pemanfaatan sumber air dan lahan di kawasan hutan lindung</p> <p>Terkoordinasi dan terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan</p> <p>Tersampainya masukan terhadap pengaturan pemanfaatan air dan energi air pada kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung</p>		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun pedoman pengelolaan sempadan mata air serta kawasan lindung imbuhan air tanah b) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota dalam pengelolaan sempadan mata air dan pengelolaan kawasan lindung imbuhan air tanah 	<p>Tersusunnya pedoman pengelolaan sempadan mata air serta kawasan lindung imbuhan air tanah</p> <p>Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota dalam pengelolaan sempadan mata air dan pengelolaan kawasan lindung imbuhan air tanah</p>		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Menyediakan informasi curah hujan untuk mendukung pembangunan fisik pada sumber air serta pemanfaatan sumber air dan lahan	Tersedianya informasi curah hujan untuk mendukung pembangunan fisik pada sumber air serta pemanfaatan sumber air dan lahan		
2)	Meningkatkan pengendalian izin kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air		Dinas PSDA	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun Rekometek untuk perijinan penambangan pada kawasan lindung sumber air sebagai dasar penerbitan izin b) Melaksanakan pengawasan kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air 	<p>Diterbitkannya ijin penambangan pada kawasan lindung sumber air sesuai rekometek</p> <p>Terlaksananya pengawasan kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air</p>	Terkendalinya penambangan pada kawasan lindung sumber air	
		Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan izin lingkungan terhadap kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi penerapan izin lingkungan terhadap kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung			
		Dinas Kehutanan / Perum Perhutani	Mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan hutan lindung	Terkoordinasinya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan hutan lindung			
3)	Menetapkan dan menata ulang daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan	5 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Dinas PSDA	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengkaji ulang dan menetapkan peraturan daerah tentang sempadan sumber air terutama pada kawasan perkotaan. b) Mengatur dan menata ulang penggunaan daerah sempadan sumber air terutama pada kawasan perkotaan 	<p>Terbitnya peraturan daerah tentang sempadan sumber air terutama pada kawasan perkotaan</p> <p>Terwujudnya pelaksanaan pengaturan dan penataan ulang penggunaan daerah sempadan sumber air pada kawasan perkotaan</p>	Tertatanya daerah sempadan sumber air pada kawasan perkotaan	
4)	Meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun peraturan tentang pengembangan kawasan yang mendukung peningkatan kapasitas resapan air b) Menyusun persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air dalam pengembangan kawasan c) Melaksanakan dan melakukan pengawasan pengembangan kawasan 	<p>Terbitnya peraturan perundang-undangan daerah tentang pengembangan kawasan yang mendukung peningkatan kapasitas resapan air</p> <p>Tersusunnya persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air dalam pengembangan kawasan</p> <p>Terlaksananya pengembangan kawasan yang mendukung kapasitas peningkatan resapan air</p>	Terwujudnya peningkatan kapasitas resapan air pada pengembangan kawasan	
		Dinas PSDA	Menyebarkan informasi mengenai kebutuhan kawasan yang berfungsi sebagai resapan air berdasarkan Pola Pengelolaan SDA	Terlaksananya penyebaran informasi mengenai kebutuhan kawasan yang berfungsi sebagai resapan air berdasarkan Pola Pengelolaan SDA			
		Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap aspek lingkungan hidup dalam pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air dalam pengembangan kawasan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap aspek lingkungan hidup dalam pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air dalam pengembangan kawasan			
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan koordinasi dalam peningkatan kapasitas resapan air, khususnya di kawasan lindung imbuhan air tanah	Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan kapasitas resapan air, khususnya di kawasan lindung imbuhan air tanah			
		Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Menyediakan informasi curah hujan pada kawasan resapan air	Tersedianya informasi curah hujan pada kawasan resapan air			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
c.	Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air, dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, dengan cara :						
	1) Mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan zona pemanfaatan sumber air yang bersangkutan	Menerus	Dinas PSDA	a) Melaksanakan penertiban dan pengawasan pemanfaatan sumber air melalui kerjasama dengan pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota b) Memfasilitasi penyelesaian masalah dalam pengendalian pemanfaatan sumber air	Terlaksananya penertiban dan pengawasan pemanfaatan sumber air melalui kerjasama dengan pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota sesuai dengan zona pemanfaatan sumber air Terfasilitasinya penyelesaian masalah dalam pengendalian pemanfaatan sumber air	Terkendalinya pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan zona pemanfaatan sumber air	
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penertiban dan pengawasan pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan oleh Pemkab/kota	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan penertiban dan pengawasan pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan oleh Pemkab/kota		
			Badan Lingkungan Hidup	Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian kualitas air pada sumber-sumber air	Terfasilitasi pengawasan dan pengendalian kualitas air pada sumber-sumber air		
	2) Menetapkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi agar tidak menambah beban pencemaran di kawasan hilir	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	a) Menyusun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan daerah yang mewajibkan semua pengembang kawasan menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi b) Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan sosialisasi pedoman tentang kewajiban penyediaan dan pengoperasian prasarana dan sarana sanitasi oleh pengembang kawasan	Terbitnya dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan daerah yang mewajibkan semua pengembang kawasan menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi Tersusun, ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi pedoman tentang kewajiban penyediaan dan pengoperasian prasarana dan sarana sanitasi oleh pengembang kawasan		
			Biro Hukum	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi instansi terkait untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban pengembang kawasan dalam menyediakan sarana dan prasarana sanitasi	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi instansi terkait untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban pengembang kawasan dalam menyediakan sarana dan prasarana sanitasi	Terwujudnya penyediaan dan pengoperasian prasarana dan sarana sanitasi oleh pengembang kawasan agar terkendalinya pencemaran di kawasan hilir	
			Badan Lingkungan Hidup	Memberi masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan sarana dan prasarana sanitasi	Diterimanya masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan sarana dan prasarana sanitasi		
			Dinas Kesehatan	a) Menyusun peraturan perundang-undangan daerah di bidang kesehatan lingkungan b) Menetapkan Pedoman Pelaksanaan STBM c) Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan STBM kepada pengembang kawasan pemukiman	Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah di bidang kesehatan lingkungan Ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan STBM Terlaksananya sosialisasi pedoman pelaksanaan STBM kepada pengembang kawasan pemukiman		
2.	Peningkatan Upaya Pengawetan Air						
a.	Meningkatkan upaya penyimpanan air yang berlebih di musim hujan oleh para pemilik kepentingan dengan cara:						
	1) Meningkatkan dan memelihara keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pemeliharaan dan pembangunan waduk dan embung	Menerus	Dinas PSDA	a) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan waduk dan embung untuk meningkatkan ketersediaan air b) Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam operasi dan pemeliharaan prasarana SDA c) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan dan pemeliharaan sumber air	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan waduk dan embung untuk meningkatkan ketersediaan air Terselenggaranya rapat koordinasi dalam operasi dan pemeliharaan prasarana SDA Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan dan pemeliharaan sumber air	Meningkat dan terpeliharanya keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pemeliharaan dan pembangunan waduk dan embung	
			Dinas Pertanian TP&H	Meningkatkan ketersediaan air untuk pertanian melalui pengembangan sumber air antara lain a) Pengembangan irigasi tanah dangkal b) Pengembangan air permukaan c) Pengembangan lumpung air / konservasi	Meningkatnya ketersediaan air untuk pertanian melalui pengembangan sumber air antara lain : a) Pengembangan irigasi tanah dangkal b) Pengembangan air permukaan c) Pengembangan lumpung air / konservasi		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Kehutanan	Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air, waduk, embung, danau, rawa dan cekungan air tanah	Terkoordinasi dan terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air, waduk, embung, danau, rawa dan cekungan air tanah		
			Badan Lingkungan Hidup	a) Memberikan rekomendasi teknik terkait dengan kelayakan pembangunan waduk dan embung b) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan dan pemeliharaan kualitas air pada sumber air khususnya waduk dan embung	Diterimanya rekomendasi teknik terkait dengan kelayakan pembangunan waduk dan embung Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan dan pemeliharaan kualitas air pada sumber air khususnya waduk dan embung		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Melaksanakan pemeliharaan penakar curah hujan dan pengamatan data hujan pada kawasan sumber air untuk mendukung pelaksanaan pemeliharaan serta pembangunan waduk dan embung	Terlaksananya pemeliharaan penakar curah hujan dan pengamatan data hujan pada kawasan sumber air untuk mendukung pelaksanaan pemeliharaan serta pembangunan waduk dan embung		
2)	Menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi serta merehabilitasi penampung air, baik alami maupun buatan, yaitu danau, rawa, waduk, dan embung serta cekungan air tanah	Menerus	Dinas PSDA	a) Melaksanakan penerbitan dan pengawasan pemanfaatan sumber air dan daerah sempadan sumber air b) Melaksanakan rehabilitasi sumber air alami dan buatan yang telah mengalami penurunan fungsi c) Melaksanakan identifikasi keberadaan dan evaluasi fungsi tampungan air d) Melaksanakan rehabilitasi tampungan air yang telah mengalami penurunan fungsi e) Melaksanakan rehabilitasi tampungan Rawa Pening	Terlaksananya penerbitan dan pengawasan pemanfaatan sumber air dan daerah sempadan sumber air. Terlaksananya rehabilitasi sumber air alami dan buatan yang telah mengalami penurunan fungsi. Terlaksananya identifikasi keberadaan dan evaluasi fungsi tampungan air Terlaksananya rehabilitasi tampungan air yang telah mengalami penurunan fungsi Terlaksananya rehabilitasi tampungan Rawa Pening	Terjaga dan terlindunginya keberadaan dan fungsi serta terehabilitasinya penampung air, baik alami maupun buatan	
		Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pengawasan dalam upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan di daerah tangkapan air danau, rawa, waduk, dan embung	Terlaksananya pengawasan dalam upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan di daerah tangkapan air danau, rawa, waduk, dan embung			
		Dinas Pertanian TP&H	Melaksanakan bimbingan teknis tentang pengelolaan sumber-sumber air yang dikelola oleh petani dengan berdasarkan asas konservasi	Terlaksananya bimbingan teknis tentang pengelolaan sumber-sumber air yang dikelola oleh petani dengan berdasarkan asas konservasi			
		Dinas Kehutanan	Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air waduk, embung, danau, rawa dan cekungan air tanah	Terkoordinasi dan terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air waduk, embung, danau, rawa dan cekungan air tanah			
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	a) Melaksanakan pemantauan kuantitas dan kualitas air tanah pada CAT lintas kabupaten / kota	Terlaksananya pemantauan kuantitas dan kualitas air tanah pada CAT lintas kabupaten / kota			
			b) Melaksanakan penetapan zona perlindungan air tanah pada cekungan air tanah sesuai dengan pedoman c) Melaksanakan pengawasan dalam upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan di daerah imbuhan, cekungan air tanah yang mengalami kerusakan d) Melaksanakan pengawasan dalam upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan di kawasan Karang Sambung, kawasan karst Sukolilo, Gombang dan Wonogiri	Terlaksananya penetapan zona perlindungan air tanah pada cekungan air tanah sesuai dengan pedoman Terlaksananya pengawasan dalam upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan di daerah imbuhan, cekungan air tanah yang mengalami kerusakan Terlaksananya pengawasan dalam upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan di kawasan Karang Sambung, kawasan karst Sukolilo, Gombang dan Wonogiri			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
	3) Meningkatkan pemanenan air hujan melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan	Menerus	Dinas PSDA	a) Membangun dan memelihara penampung air hujan percontohan dalam rangka memanen air hujan kepada masyarakat b) Memberikan stimulan pembangunan dan pemeliharaan bangunan penampung air hujan kepada masyarakat	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan percontohan dalam rangka memanen air hujan kepada masyarakat Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan bangunan penampung air hujan kepada masyarakat	Meningkatnya ketersediaan air terutama pada musim kemarau melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan	
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan upaya replikasi percontohan peningkatan konservasi air melalui pembangunan sumur resapan	Terlaksananya upaya replikasi percontohan peningkatan konservasi air melalui pembangunan sumur resapan		
			Dinas Pertanian TP&H	Meningkatkan ketersediaan air untuk pertanian melalui pengembangan embung	Meningkatnya ketersediaan air untuk pertanian melalui pengembangan embung		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	a) Mengkoordinasikan penelitian terkait teknologi pemanenan air hujan b) Menyediakan informasi curah hujan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan	Terlaksananya koordinasi penelitian terkait teknologi pemanenan air hujan Tersedianya informasi curah hujan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan		
	4) Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha	Menerus	Dinas PSDA	Melaksanakan sosialisasi pengawetan air dan pemanfaatan air hujan kepada masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya sosialisasi pengawetan air dan pemanfaatan air hujan kepada masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya pengawetan air permukaan dan air tanah oleh masyarakat dan dunia usaha	
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melaksanakan sosialisasi pedoman teknis kawasan industri tentang kewajiban mengalokasikan ruang terbuka hijau untuk pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya sosialisasi pedoman teknis kawasan industri tentang kewajiban mengalokasikan ruang terbuka hijau untuk pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan sosialisasi pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha terkait air tanah	Terlaksananya sosialisasi pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha terkait air tanah		
b.	Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah oleh para pemilik kepentingan, dengan cara:						
	1) Menciptakan sistem insentif dan disinsentif melalui skema tarif progresif kepada pemakai air	3 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Dinas PSDA	a) Menyusun, menetapkan dan melaksanakan sosialisasi pedoman penetapan tarif progresif penggunaan air permukaan b) Melaksanakan ketentuan tarif progresif berdasarkan pedoman	Tersusun, ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi pedoman penetapan tarif progresif penggunaan air permukaan Terlaksananya ketentuan tarif progresif berdasarkan pedoman	Terwujudnya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah oleh para pemilik kepentingan	
			Badan Lingkungan Hidup	Menyampaikan masukan dalam penyusunan pedoman penetapan tarif progresif penggunaan air	Tersampainya masukan dalam penyusunan pedoman penetapan tarif progresif penggunaan air		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	a) Menyusun sistem insentif dan disinsentif melalui skema tarif progresif kepada pengguna air tanah b) Melaksanakan sosialisasi sistem insentif dan disinsentif	Tersusunnya sistem insentif dan disinsentif melalui skema tarif progresif kepada pengguna air tanah Terlaksananya sosialisasi sistem insentif dan disinsentif		
	2) Mendorong penggunaan teknologi daur ulang air limbah untuk air baku	Menerus	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	a) Melaksanakan sosialisasi tentang teknologi daur ulang air limbah b) Menetapkan peraturan tentang insentif untuk mendorong penerapan teknologi daur ulang air limbah c) Melaksanakan sosialisasi penggunaan teknologi reduce, reuse, recycle (3R) dalam pengelolaan air limbah rumah tangga	Terlaksananya sosialisasi tentang teknologi daur ulang air limbah Ditetapkannya peraturan tentang insentif untuk mendorong penerapan teknologi daur ulang air limbah Terlaksananya sosialisasi penggunaan teknologi reduce, reuse, recycle (3R) dalam pengelolaan air limbah rumah tangga	Meningkatnya penggunaan teknologi daur ulang air limbah untuk meningkatkan penyediaan air baku	
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pemberian penghargaan kepedulian lingkungan terhadap upaya penggunaan teknologi daur ulang air limbah	Terlaksananya pemberian penghargaan kepedulian lingkungan terhadap upaya penggunaan teknologi daur ulang air limbah		
			Dinas Kesehatan	Melaksanakan sosialisasi penggunaan teknologi reduce, reuse, recycle (3R) dalam pengelolaan air limbah fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya sosialisasi penggunaan teknologi reduce, reuse, recycle (3R) dalam pengelolaan air limbah fasilitas pelayanan kesehatan		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a) Melaksanakan sosialisasi Penerapan Produksi Bersih pada Industri dalam pengelolaan air limbah b) Memberikan penghargaan kepada pelaku industri yang menerapkan teknologi daur ulang air limbah sebagai bagian dari pengembangan industri hijau	Terlaksananya sosialisasi Penerapan Produksi Bersih pada Industri dalam pengelolaan air limbah Diterimanya penghargaan kepada pelaku industri yang menerapkan teknologi daur ulang air limbah sebagai bagian dari pengembangan industri hijau		
3)	Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi hemat air untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	a) Melaksanakan sosialisasi tentang teknologi hemat air b) Menetapkan peraturan tentang insentif untuk mendorong penerapan teknologi hemat air c) Menyediakan insentif kepada pengguna air yang menerapkan teknologi hemat air	Terlaksananya sosialisasi tentang teknologi hemat air Ditetapkannya peraturan tentang insentif untuk mendorong penerapan teknologi hemat air Tersedianya insentif kepada pengguna air yang menerapkan teknologi hemat air	Terwujudnya pengembangan dan penerapan teknologi hemat air untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri	
		Badan Lingkungan Hidup	Memberi penghargaan kepedulian lingkungan terkait penerapan teknologi hemat air	Diterimanya penghargaan kepedulian lingkungan terkait penerapan teknologi hemat air			
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a) Melaksanakan sosialisasi pada Industri tentang penerapan teknologi yang hemat air b) Memberikan penghargaan kepada pelaku industri yang menerapkan teknologi hemat air sebagai bagian dari pengembangan industri hijau	Terlaksananya sosialisasi pada Industri tentang penerapan teknologi yang hemat air Diterimanya penghargaan kepada pelaku industri yang menerapkan teknologi hemat air sebagai bagian dari pengembangan industri hijau			
		Dinas Pertanian TP&H	Meningkatkan sosialisasi hemat air kepada kelompok tani / kelembagaan P3A melalui penerapan teknologi SRI dan kegiatan lainnya	Meningkatnya sosialisasi hemat air kepada kelompok tani / kelembagaan P3A melalui penerapan teknologi SRI dan kegiatan lainnya			
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan sosialisasi penerapan teknologi hemat air bagi penggunaan air tanah	Terlaksananya sosialisasi penerapan teknologi hemat air bagi penggunaan air tanah			
4)	Mengendalikan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah yang kondisinya kritis dan sungai bawah tanah pada kawasan karst dengan membatasi pengambilan sesuai kapasitas spesifik		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	a) Melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota mengenai daftar zona rawan, zona kritis air tanah dan zona rusak air tanah pada CAT b) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan perizinan melalui penerbitan rekomendasi teknis pengambilan air tanah pada CAT lintas Kab/ Kota pada zona rawan, zona kritis air tanah dan zona rusak air tanah c) Menetapkan zona konservasi air tanah sebagai dasar pemberian rekomendasi teknis penggunaan air tanah pada CAT lintas kabupaten/ kota dan/atau dalam kabupaten / kota d) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan perizinan melalui penerbitan rekomendasi teknis pengambilan air tanah pada kawasan karst Sukolilo, Gombang dan Wonogiri	Terlaksananya sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota mengenai daftar zona rawan, zona kritis air tanah dan zona rusak air tanah pada CAT Terlaksananya pengendalian pelaksanaan perizinan melalui penerbitan rekomendasi teknis pengambilan air tanah pada CAT lintas Kab/ Kota pada zona rawan, zona kritis air tanah dan zona rusak air tanah Ditetapkannya zona konservasi air tanah sebagai dasar pemberian rekomendasi teknis penggunaan air tanah pada CAT lintas kabupaten/ kota dan/atau dalam kabupaten / kota Terlaksananya pengendalian pelaksanaan perizinan melalui penerbitan rekomendasi teknis pengambilan air tanah pada kawasan karst Sukolilo, Gombang dan Wonogiri	Terkendalinya pengambilan air tanah pada CAT dan sungai bawah tanah pada kawasan karst sesuai kapasitas spesifik	
			Dinas PSDA	Meningkatkan penyediaan prasarana pendayagunaan air permukaan untuk mengurangi penggunaan air tanah	Meningkatnya penyediaan prasarana pendayagunaan air permukaan untuk mengurangi penggunaan air tanah		
5)	Merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	a) Melaksanakan rehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah b) Melaksanakan inventarisasi rinci pada kawasan imbuhan air tanah yang telah ditetapkan	Terlaksananya rehabilitasi dan peningkatan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah Terlaksananya inventarisasi rinci pada kawasan imbuhan air tanah yang telah ditetapkan	Terwujudnya rehabilitasi dan peningkatan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah	
		Dinas Kehutanan	a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya rehabilitasi lahan untuk meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah b) Memberikan rekomendasi tentang teknologi rehabilitasi dalam peningkatan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah	Terkoordinasi dan terlaksananya upaya rehabilitasi lahan untuk meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah Tersedianya rekomendasi tentang teknologi rehabilitasi dalam peningkatan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
6)	Membatasi penggunaan air tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan air di berbagai sumber air untuk meningkatkan manfaat air baku yang berasal dari air permukaan	3 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Dinas Pertanian TP&H	Meningkatkan bimbingan teknis kepada petani dalam kegiatan optimasi pemanfaatan lahan	Meningkatnya bimbingan teknis kepada petani dalam kegiatan optimasi pemanfaatan lahan	Terkendalinya penggunaan air tanah dan meningkatnya pemanfaatan air permukaan	
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pembangunan sumur resapan dan teknologi resapan air	Tertindakannya pembangunan sumur resapan dan teknologi resapan air		
			Dinas PSDA	a) Melaksanakan kaji ulang penggunaan air tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan air diberbagai sumber air b) Melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten / kota tentang penghematan penggunaan air tanah	Hasil kaji ulang penggunaan air tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan air diberbagai sumber air Tertindakannya sosialisasi kepada pemerintah kabupaten / kota tentang penghematan penggunaan air tanah		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Memberikan masukan terhadap kaji ulang penggunaan air tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan air diberbagai sumber air	Diterimanya masukan terhadap kaji ulang penggunaan air tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan air diberbagai sumber air		
3.	Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air						
a.	Menetapkan kelas air pada sungai prioritas dan menetapkan status tropik pada waduk, embung dan danau	2014	Badan Lingkungan Hidup	1) Menetapkan kelas air pada sungai prioritas 2) Menetapkan status tropik pada waduk, embung dan danau 3) Melaksanakan pemantauan penerapan standar kualitas air sesuai peruntukannya	Ditetapkannya kelas air pada sungai prioritas Ditetapkannya status tropik pada waduk, embung dan danau Tertindakannya pemantauan penerapan standar kualitas air sesuai peruntukannya	Terpedomaninya status kelas air pada sungai prioritas dan status tropik pada waduk, embung, danau dan lumbung air	
Dinas PSDA	Menyampaikan masukan dalam penetapan status tropik pada waduk, embung dan danau serta penetapan kelas air pada sungai prioritas	Tersampainya masukan dalam penetapan status tropik pada waduk, embung dan danau serta penetapan kelas air pada sungai prioritas					
Dinas Kelautan dan Perikanan	Memberi masukan tentang kualitas air terkait budidaya perikanan (baku mutu air kelas c)	Diterimanya masukan tentang kualitas air terkait budidaya perikanan (baku mutu air kelas c)					
b.	Meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai kelas air dan/atau status tropik yang telah ditetapkan	Menerus	Dinas PSDA	1) Mengupayakan dan memantau penerapan standar kualitas air pada sumber air sesuai peruntukan 2) Memantau kualitas air pada sumber air dan status tropik pada waduk, embung, danau dan lumbung air 3) Melaksanakan perbaikan kualitas air sesuai dengan kelas air dan status tropik yang ditetapkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha 4) Menyusun kebijakan dan pedoman penggunaan sumber daya air untuk sektor industri	Tertindakannya upaya dan pemantauan penerapan standar kualitas air pada sumber air sesuai peruntukan Tertindakannya pemantauan kualitas air pada sumber air dan status tropik pada waduk, embung, danau dan lumbung air Tertindakannya perbaikan kualitas air sesuai dengan kelas air dan status tropik yang ditetapkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha Tersusunnya kebijakan dan pedoman penggunaan sumber daya air untuk sektor industri	Terwujudnya peningkatan dan pemulihan kualitas air pada sumber air secara partisipatif untuk mencapai kelas air dan status tropik pada waduk, embung, danau dan lumbung air yang telah ditetapkan	
Badan Lingkungan Hidup	1) Menyusun pedoman teknis dan melaksanakan sosialisasi dalam kegiatan pemulihan kualitas air pada sumber air 2) Berperan aktif dalam koordinasi kegiatan pemulihan kualitas air pada sumber air yang tercemar 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan baku mutu air limbah	Tersusun pedoman teknis dan melaksanakan sosialisasi dalam kegiatan pemulihan kualitas air pada sumber air Tertindakannya peran aktif dalam koordinasi kegiatan pemulihan kualitas air pada sumber air yang tercemar Tertindakannya pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan baku mutu air limbah					
Dinas Kesehatan	Melaksanakan penguatan dan pengembangan jejaring kemitraan pengawasan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas air minum	Tertindakannya penguatan dan pengembangan jejaring kemitraan pengawasan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas air minum					
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Memberikan masukan terhadap kegiatan penggunaan sumber daya air untuk sektor industri	Tertindakannya pemberian masukan terhadap kegiatan penggunaan sumber daya air untuk sektor industri					

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
c.	Menetapkan beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran dan setiap kawasan permukiman dan industri	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Badan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan daerah tentang beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman dan industri 2) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan dunia usaha dan masyarakat dalam pembuangan limbah ke sungai dan saluran 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman teknis inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar 4) Menyusun dan melaksanakan kebijakan provinsi dalam pengendalian pencemaran air 5) Mengembangkan dan memfasilitasi replikasi model pengendalian pencemaran air 	<p>Tersusun dan ditetapkannya peraturan perundang-undangan daerah tentang beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman dan industri</p> <p>Terlaksananya pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan dunia usaha dan masyarakat dalam pembuangan limbah ke sungai dan saluran</p> <p>Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman teknis inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar</p> <p>Tersusun dan terlaksananya kebijakan provinsi dalam pengendalian pencemaran air</p> <p>Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi replikasi model pengendalian pencemaran air</p>	Berkurangnya beban maksimum limbah yang di buang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman dan industri	
	Dinas PSDA	Membantu pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan dunia usaha dan masyarakat dalam pembuangan limbah ke sungai dan saluran	Terlaksananya bantuan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan dunia usaha dan masyarakat dalam pembuangan limbah ke sungai dan saluran				
d.	Membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri & industri di luar kawasan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	4 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman serta kawasan industri & industri di luar kawasan 2) Melaksanakan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan dan pengoperasian sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman 3) Membangun percontohan dan replikasi model pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman secara partisipatif 	<p>Terlaksananya pembangunan dan pengoperasian sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman serta kawasan industri & industri di luar kawasan</p> <p>Terlaksananya pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan dan pengoperasian sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman</p> <p>Terbangunnya percontohan dan replikasi model pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman secara partisipatif</p>	Terwujudnya pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman serta kawasan industri & industri di luar kawasan secara partisipatif	
	Badan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun percontohan dan replikasi model pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan industri dan industri diluar kawasan secara partisipatif 2) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri dalam pembangunan dan pengoperasian instalasi pengolahan limbah (IPL) sesuai dengan ketentuan perizinan 	<p>Terbangunnya percontohan dan replikasi model pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan industri dan industri diluar kawasan secara partisipatif</p> <p>Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri dalam pembangunan dan pengoperasian instalasi pengolahan limbah (IPL) sesuai dengan ketentuan perizinan</p>				
e.	Mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	Menerus	Dinas PSDA	Memfasilitasi dan melaksanakan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	Terfasilitasi dan terlaksananya pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	Terwujudnya penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air	
	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Melaksanakan dan mewajibkan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air pada kawasan permukiman	Terlaksananya pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air pada kawasan permukiman				
	Badan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air 2) Memfasilitasi pelaksanaan percontohan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air 	<p>Terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air</p> <p>Terfasilitasinya pelaksanaan percontohan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air</p>				
	Dinas Kesehatan	Melaksanakan dan mewajibkan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air minum di masyarakat	Terlaksananya pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air minum di masyarakat				

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Penindustrian dan Perdagangan	Melaksanakan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air pada kawasan industri dan industri diluar kawasan	Terlaksananya pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air pada kawasan industri dan industri diluar kawasan		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air tanah	Terlaksananya pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air tanah		
f.	Membangun dan meningkatkan sistem pemantauan limbah sebelum masuk ke dalam sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Melaksanakan pengembangan sistem pemantauan limbah di kawasan permukiman sebelum masuk kedalam sumber air secara periodik	Terlaksananya pengembangan sistem pemantauan limbah di kawasan permukiman sebelum masuk kedalam sumber air secara periodik	Terwujudnya sistem pemantauan limbah sebelum masuk kedalam sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air	
		Dinas PSDA	1) Membangun pos pemantauan kualitas air pada sumber air 2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kualitas air secara periodik pada sumber air	Terbangunnya pos pemantauan kualitas air pada sumber air Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kualitas air secara periodik pada sumber air			
		Badan Lingkungan Hidup	1) Menyusun dan melaksanakan sosialisasi pedoman teknis pemantauan kualitas air limbah sebelum masuk sumber air 2) Meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten / kota dan pelaku usaha dalam pemantauan air limbah sebelum masuk sumber air 3) Melaksanakan sosialisasi pedoman teknis kawasan industri untuk melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke sumber air 4) Melaksanakan sosialisasi peningkatan kemampuan pelaku industri dalam pemantauan air limbah sebelum masuk ke sumber air 5) Melaksanakan pemantauan limbah pada kawasan industri dan industri diluar kawasan	Tersusun dan terlaksananya sosialisasi pedoman teknis pemantauan kualitas air limbah sebelum masuk sumber air Meningkatnya kapasitas pemerintah kabupaten / kota dan pelaku usaha dalam pemantauan air limbah sebelum masuk sumber air Terlaksananya sosialisasi pedoman teknis kawasan industri untuk melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke sumber air Terlaksananya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaku industri dalam pemantauan air limbah sebelum masuk ke sumber air Terlaksananya pemantauan limbah pada kawasan industri dan industri diluar kawasan			
		Dinas Kesehatan	1) Melaksanakan penguatan kapasitas layanan laboratorium uji kualitas air dan lingkungan 2) Melaksanakan pemantauan limbah pada instalasi pelayanan kesehatan sebelum masuk kedalam sumber air	Terlaksananya penguatan kapasitas layanan laboratorium uji kualitas air dan lingkungan Terlaksananya pemantauan limbah pada instalasi pelayanan kesehatan sebelum masuk kedalam sumber air			
g.	Mengendalikan budidaya perikanan karamba atau jaring apung di danau, waduk, dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air & daya tampung serta daya dukung sesuai dengan peruntukannya secara menerus	Mulai 2014	Dinas PSDA	1) Melaksanakan kajian daya tampung dan daya dukung danau, waduk, dan rawa untuk budi daya perikanan karamba dan jaring apung 2) Melaksanakan penetapan zona pemanfaatan sumber air dan penertiban budidaya perikanan sesuai dengan penetapan zona 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian budidaya perikanan pada sumber air 4) Melaksanakan penertiban budidaya perikanan sesuai peruntukan sumber air	Hasil kajian daya tampung dan daya dukung danau, waduk, dan rawa untuk budi daya perikanan karamba dan jaring apung Terlaksananya penetapan zona pemanfaatan sumber air dan penertiban budidaya perikanan sesuai dengan penetapan zona Terlaksananya pengawasan dan pengendalian budidaya perikanan pada sumber air Terlaksananya penertiban budidaya perikanan sesuai peruntukan sumber air	Terkendalinya budi daya perikanan karamba dan/atau jaring apung di danau, waduk, dan rawa	
		Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pedoman tentang daya tampung beban pencemaran danau, waduk dan rawa	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pedoman tentang daya tampung beban pencemaran danau, waduk dan rawa			
		Dinas Kelautan dan Perikanan	1) Membuat pedoman budi daya perikanan karamba atau jaring apung di danau, waduk, dan rawa 2) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengawasan dan pengendalian kepada pelaku usaha budidaya perikanan karamba atau jaring apung sesuai peruntukannya	Terbitnya pedoman budi daya perikanan karamba atau jaring apung di danau, waduk, dan rawa Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengawasan dan pengendalian kepada pelaku usaha budidaya perikanan karamba atau jaring apung sesuai peruntukannya			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
h.	Memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada didekat dan/atau di atas badan air sesuai rencana tata ruang	4 thn sth Jaknas SDA di tetapkan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan melaksanakan sosialisasi pedoman penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman 2) Menetapkan prioritas fasilitas kabupaten/kota dalam penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman 	<p>Tersusun dan terlaksananya sosialisasi pedoman penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman</p> <p>Terfasilitasinya kabupaten/kota dalam penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman sesuai prioritas</p>	Terjaganya kualitas air pada kawasan permukiman yang berada didekat dan/atau di atas badan air sesuai rencana tata ruang	
		Badan Lingkungan Hidup	Membangun percontohan sistem sanitasi komunal di permukiman padat penduduk	Terbangunnya percontohan sistem sanitasi komunal di permukiman padat penduduk			
		Dinas Kesehatan	Memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada kawasan permukiman di dekat atau di atas badan air	Terfasilitasinya pemicuan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada kawasan permukiman di dekat atau di atas badan air			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
III	Kebijakan Pendayagunaan SDA Untuk Kredit dan Kesejahteraan Masyarakat						
1.	Peningkatan Upaya Penatagunaan SDA						
a.	Menetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan acuan bagi penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah & rencana pengelolaan SDA pada wilayah sungai	5 thn sth Jaknas SDA ditetapkan	Dinas PSDA Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bappeda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Melaksanakan penetapan zona pemanfaatan sumber air Menyusun perubahan RTRW sesuai dengan zona pemanfaatan sumber air Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka terwujudnya sinkronisasi antara penetapan zona pemanfaatan sumber air dengan RTRW Menyediakan informasi zona pemanfaatan air tanah untuk mendukung penyusunan zona pemanfaatan sumber air Menata jaringan penakar curah hujan pada penyusunan zona pemanfaatan sumber air	Tertaksananya penetapan zona pemanfaatan sumber air Tersusunnya perubahan RTRW sesuai dengan zona pemanfaatan sumber air Terlaksananya pemantauan dan evaluasi dalam rangka terwujudnya sinkronisasi antara penetapan zona pemanfaatan sumber air dengan RTRW Tersedianya informasi zona pemanfaatan air tanah untuk mendukung penyusunan zona pemanfaatan sumber air Tertatanya jaringan penakar curah hujan pada penyusunan zona pemanfaatan sumber air, dalam rangka meningkatkan keakuratan informasi prakiraan curah hujan	Terwujudnya zonasi pemanfaatan sumber air yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	
b.	Menetapkan peruntukan air pada sumber air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sumber air yang bersangkutan	5 thn sth Jaknas SDA ditetapkan	Dinas PSDA Badan Lingkungan Hidup Dinas Pertanian TP&H Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Kesehatan	1) Mengkaji ulang peruntukan air pada sumber air 2) Melaksanakan penetapan peruntukan air pada sumber air sesuai dengan hasil kaji ulang 1) Memfasilitasi penetapan peruntukan air pada sungai prioritas 2) Memfasilitasi penetapan kelas air pada sumber air Menyediakan data dan informasi mengenai kebutuhan air untuk pertanian pada sumber air Menyediakan data dan informasi mengenai kebutuhan air untuk kawasan industri dan industri diluar kawasan Menyediakan data dan informasi mengenai kebutuhan air untuk institusi pelayanan kesehatan	Hasil Kaji ulang peruntukan air pada sumber air Terlaksananya penetapan peruntukan air pada sumber air sesuai dengan hasil kaji ulang Terfasilitasinya penetapan peruntukan air pada sungai prioritas Terfasilitasinya penetapan kelas air pada sumber air Tersedianya data dan informasi mengenai kebutuhan air untuk pertanian pada sumber air Tersedianya data dan informasi mengenai kebutuhan air untuk kawasan industri dan industri diluar kawasan Tersedianya data dan informasi mengenai kebutuhan air untuk institusi pelayanan kesehatan	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sumber air	
c.	Melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim	Menerus	Dinas PSDA Bappeda Dinas Pertanian TP&H Dinas Kehutanan / Perum Perhutani Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Kelautan dan Perikanan Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Menyusun rencana tindak pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dengan melibatkan pemilik kepentingan Mengkoordinasikan dan memfasilitasi dinas / badan terkait dalam penyusunan rencana tindak pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim Melaksanakan pedoman teknis SLI dalam rangka adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dalam rencana tindak pengelolaan SDA Melaksanakan kerjasama dengan pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak pengurangan emisi dengan mencegah deforestasi dan degradasi hutan Menyusun rencana pengembangan pengelolaan air tanah untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim Menyusun rencana pengembangan pengelolaan ingasi tambak dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim Menyediakan informasi prakiraan iklim / musim sebagai bahan masukan secara periodik untuk menyusun rencana tindak pengelolaan SDA	Tersusunnya rencana tindak pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dengan melibatkan pemilik kepentingan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dinas / badan terkait dalam penyusunan rencana tindak pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim Terlaksananya pedoman teknis SLI dalam rangka adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dalam rencana tindak pengelolaan SDA Tertaksananya kerjasama dengan pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak pengurangan emisi dengan mencegah deforestasi dan degradasi hutan Tersusunnya rencana pengembangan pengelolaan air tanah untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim Tersusunnya rencana pengembangan pengelolaan ingasi tambak dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim Tersedianya informasi prakiraan iklim / musim sebagai bahan masukan secara periodik untuk menyusun rencana tindak pengelolaan SDA	Meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dalam penyusunan rencana tindak pengelolaan SDA	

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
1	Menetapkan alokasi ruang untuk pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan	3 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bappeda Dinas PSDA Badan Lingkungan Hidup Dinas Pertanian TP&H Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Pertanahan Nasional	Menyusun dan menetapkan PERDA RTRW Provinsi yang mengakomodasi lahan pertanian berkelanjutan Mengkoordinasikan masukan tentang alokasi ruang untuk pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan 1) Memberikan masukan penetapan daerah irigasi di dalam penyusunan RTRW 2) Mempertahankan daerah irigasi yang sudah tercantum dalam rencana tata ruang Melaksanakan evaluasi tata ruang lingkungan hidup untuk memberikan masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan RTRW terkait dengan alih fungsi lahan pertanian 1) Melaksanakan sosialisasi tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat 2) Melaksanakan percepatan penerbitan turunan dari peraturan perundang-undangan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat 1) Menyampaikan informasi tentang kebutuhan dan syarat untuk pembangunan kawasan industri sebagai masukan dalam pengalokasian ruang pada RTRW 2) Melaksanakan sosialisasi tentang kawasan industri kepada pelaku usaha industri Memberikan rekomendasi penggunaan lahan untuk menjamin perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah kabupaten/kota	Tersusun dan terbitnya PERDA RTRW Provinsi yang mengakomodasi lahan pertanian berkelanjutan Terkoordinasinya masukan tentang alokasi ruang untuk pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan Diterimanya masukan penetapan daerah irigasi di dalam penyusunan RTRW Terjaganya daerah irigasi yang sudah tercantum dalam rencana tata ruang Terlaksananya evaluasi tata ruang lingkungan hidup untuk memberikan masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan RTRW terkait dengan alih fungsi lahan pertanian Terlaksananya sosialisasi tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat Terlaksananya percepatan penerbitan turunan dari peraturan perundang-undangan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat Tersampainya informasi tentang kebutuhan dan syarat untuk pembangunan kawasan industri sebagai masukan dalam pengalokasian ruang pada RTRW Terlaksananya sosialisasi tentang kawasan industri kepada pelaku usaha industri Terbitnya rekomendasi penggunaan lahan untuk menjamin perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kepada pemerintah kabupaten/kota	Tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan tetap memberikan alokasi ruang untuk pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan	
2.	Peningkatan Upaya Penyediaan Air						
a	Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan SDA pada setiap wilayah sungai	5 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Dinas PSDA Dinas Pertanian TP&H Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan studi, menetapkan dan melaksanakan rencana alokasi air pada setiap wilayah sungai sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan SDA Menyampaikan informasi mengenai kebutuhan air untuk pertanian sebagai masukan untuk penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA 1) Melaksanakan survei dan pemetaan kebutuhan air di sektor industri 2) Menyampaikan hasil survei sebagai masukan untuk penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA 1) Mensosialisasikan pedoman penyusunan rencana alokasi air tanah pada CAT 2) Menetapkan rencana alokasi air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota Menyampaikan informasi mengenai kebutuhan air untuk budidaya ikan sebagai masukan guna penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA	1) Hasil studi rencana alokasi air pada setiap wilayah sungai 2) Ditetapkan dan dilaksanakannya alokasi air pada setiap wilayah sungai Tersampainya informasi mengenai kebutuhan air untuk pertanian sebagai masukan untuk penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Terlaksananya survei dan pemetaan kebutuhan air di sektor industri Tersampainya hasil survei sebagai masukan untuk penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Terlaksananya sosialisasi pedoman penyusunan rencana alokasi air tanah pada CAT Ditetapkannya rencana alokasi air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota Tersampainya informasi mengenai kebutuhan air untuk budidaya ikan sebagai masukan guna penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA	Terwujudnya peningkatan penyediaan air melalui pelaksanaan alokasi air pada setiap wilayah sungai	

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
b.	Melaksanakan pengelolaan SDA terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi	2015	Dinas PSDA	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan pola dan rencana pengelolaan SDA terpadu yang mengakomodasi kebutuhan air bersih dan sanitasi Melaksanakan rencana pengelolaan SDA terpadu 	<p>Ditetapkannya pola dan rencana pengelolaan SDA terpadu yang mengakomodasi kebutuhan air bersih dan sanitasi</p> <p>Dilaksanakannya rencana pengelolaan SDA terpadu</p>	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi	
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai dengan pengelolaan SDA terpadu untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi yang bersumber dari air tanah	Terlaksananya pengelolaan air tanah sesuai dengan pengelolaan SDA terpadu untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi yang bersumber dari air tanah		
			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi sesuai dengan rencana pengelolaan SDA terpadu	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi sesuai dengan rencana pengelolaan SDA terpadu		
c.	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada sebagai prioritas utama dalam penyediaan air	Menerus	Dinas PSDA	Memprioritaskan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi untuk pertanian rakyat sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan	Tersedianya penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan	Terwujudnya penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat yang ada	
			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Menyediakan data kebutuhan pokok air sehari-hari untuk permukiman perkotaan dan industri	Tersedianya data kebutuhan pokok air sehari-hari untuk permukiman perkotaan dan industri		
			Dinas Pertanian TP&H	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan inventarisasi luas dan sebaran daerah irigasi untuk menentukan kebutuhan air bagi pertanian rakyat Melaksanakan audit layanan air pada jaringan irigasi tingkat usaha tani Melaksanakan pembinaan kepada petani dalam pemanfaatan air irigasi 	<p>Terlaksananya inventarisasi luas dan sebaran daerah irigasi untuk menentukan kebutuhan air bagi pertanian rakyat</p> <p>Terlaksananya audit layanan air pada jaringan irigasi tingkat usaha tani</p> <p>Terlaksananya pembinaan kepada petani dalam pemanfaatan air irigasi</p>		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyediakan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi air tanah melalui rekomendasi kegiatan pengeboran air tanah di daerah sulit air	Tersedianya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi air tanah melalui rekomendasi kegiatan pengeboran air tanah di daerah sulit air		
3.	Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan SDA						
a.	Mengembangkan perangkat kelembagaan untuk pengendalian penggunaan SDA di wilayah sungai (WS)	Menerus	Dinas PSDA	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mengendalikan penggunaan SDA melalui pelatihan, sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan Memfasilitasi dan melaksanakan pelatihan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola SDA untuk pengendalian penggunaan SDA 	<p>Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk pengendalian penggunaan SDA</p> <p>Terfasilitasi dan terlaksananya pelatihan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola SDA untuk pengendalian penggunaan SDA</p>	Meningkatnya efisiensi penggunaan SDA di WS melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA	
			Dinas Pertanian TP&H	Meningkatkan kinerja perangkat kelembagaan pengelola air irigasi di tingkat usaha tani	Meningkatnya kinerja perangkat kelembagaan pengelola air irigasi di tingkat usaha tani		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatkan kinerja pengelolaan air tanah	Meningkatnya kinerja pengelolaan air tanah		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan kinerja di bidang perikanan budidaya	Meningkatnya kinerja di bidang perikanan budidaya		
b.	Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan SDA yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	Menerus	Dinas PSDA	<ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan masukan dalam penggunaan SDA yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam Melaksanakan penegakan hukum oleh PPNS daerah terhadap penggunaan SDA yang berlebihan 	<p>Tersampainya masukan dalam penggunaan SDA yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam</p> <p>Terlaksananya penegakan hukum oleh PPNS daerah terhadap penggunaan SDA yang berlebihan</p>	Terlindungnya penggunaan SDA yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap terganggunya ekosistem di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam bersama instansi terkait	Terlaksananya pengawasan dan penyidikan terhadap terganggunya ekosistem di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam bersama instansi terkait		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Indikator	Ket
			Dinas Kehutanan / Perum Perhutani / BTN dan BKSDA	1) Melaksanakan pembinaan masyarakat sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam terhadap penggunaan SDA yang berlebihan 2) Melaksanakan pengawasan, penyidikan dan pengamanan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	Tertindakannya pembinaan masyarakat sekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam Tertindakannya pengawasan, penyidikan dan pengamanan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyampaikan masukan dalam penggunaan air tanah yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	Tersampainya masukan dalam penggunaan air tanah yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam		
c.	Meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh para pengguna air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan provinsi dan nasional		Dinas PSDA	1) Melakukan pemberdayaan pengguna air irigasi melalui pendampingan dan pelatihan dalam rangka efisiensi penggunaan air irigasi 2) Melaksanakan kampanye penyadaran publik tentang gerakan hemat air 3) Melaksanakan pengembangan teknologi prasarana irigasi yang lebih efisien 4) Melaksanakan penyebaran hasil penelitian tentang peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi dan tanaman hemat air	Tertindakannya pendampingan dan pelatihan dalam rangka efisiensi penggunaan air irigasi Tertindakannya kampanye penyadaran publik tentang gerakan hemat air Tertindakannya pengembangan teknologi prasarana irigasi yang lebih efisien Tertindakannya penyebaran hasil penelitian tentang peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi dan tanaman hemat air	Terwujudnya efisiensi penggunaan air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan provinsi dan nasional	
		Menerus	Bappeda	Mengkoordinasikan dan mensinergikan rencana pembangunan terkait dengan efisiensi pemanfaatan air irigasi	Tertindakannya koordinasi dan sinergi rencana pembangunan terkait dengan efisiensi pemanfaatan air irigasi		
			Dinas Pertanian TP&H	1) Meningkatkan kepedulian masyarakat tentang efisiensi dalam penggunaan air 2) Menerbitkan surat edaran gubernur mengenai efisiensi penggunaan air tingkat usaha tani	Meningkatnya kepedulian masyarakat tentang efisiensi dalam penggunaan air Terbitnya surat edaran menteri mengenai efisiensi penggunaan air tingkat usaha tani		
			Badan Ketahanan Pangan	Meningkatkan pembinaan kepada petani dalam penerapan teknologi hemat air pada budidaya tanaman melalui SRI, SLPTT, dan SLI	Meningkatnya pembinaan kepada petani dalam penerapan teknologi hemat air pada budidaya tanaman melalui SRI, SLPTT, dan SLI		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan evaluasi terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan air tanah untuk irigasi pada CAT lintas provinsi dan CAT lintas kabupaten/kota	Tertindakannya evaluasi terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan air tanah untuk irigasi pada CAT lintas provinsi dan CAT lintas negara		
4.	Peningkatan Upaya Pengembangan SDA						
a	Menyusun program pengembangan sumber daya air yang didasarkan pada rencana pengelolaan SDA pada setiap wilayah sungai	2 thn stlh rencana PSDA di tetapkan	Dinas PSDA	Melaksanakan penyusunan program pengkajian dan pengembangan SDA berdasarkan rencana pengelolaan SDA pada setiap WS	Tertindakannya penyusunan program pengkajian dan pengembangan SDA berdasarkan rencana pengelolaan SDA pada setiap WS		
			Bappeda	Menyelaraskan program antar lembaga pemerintah yang terkait dengan pengembangan SDA	Tertindakannya keselarasan program antar lembaga pemerintah yang terkait dengan pengembangan SDA		
			Biro Pembangunan Daerah	Melaksanakan fasilitasi kepada kabupaten/kota dalam penyusunan program tahunan pengembangan SDA yang didasarkan pada Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	Tertindakannya fasilitasi kepada kabupaten/kota dalam penyusunan program tahunan pengembangan SDA yang didasarkan pada Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS		
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan penyusunan program pengembangan SDA terkait dengan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	Tertindakannya penyusunan program pengembangan SDA terkait dengan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS		
			Dinas Pertanian TP&H	Melaksanakan penyusunan program bidang pertanian untuk mendukung pengembangan SDA	Tertindakannya penyusunan program bidang pertanian untuk mendukung pengembangan SDA		
			Dinas Kehutanan	Melaksanakan penyusunan program bidang kehutanan untuk mendukung pengembangan SDA	Tertindakannya penyusunan program bidang kehutanan untuk mendukung pengembangan SDA		
			Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Menyusun cetak biru pengembangan jaringan transportasi waduk dan danau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Tersusunnya cetak biru pengembangan jaringan transportasi waduk dan danau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1) Melaksanakan survei dan pemetaan kebutuhan air di sektor industri 2) Menyampaikan hasil survei sebagai masukan untuk penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA	Terlaksananya survei dan pemetaan kebutuhan air di sektor industri Tersampainya hasil survei sebagai masukan untuk penetapan rencana alokasi air dalam penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan penyusunan program pengembangan air tanah berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan RTRW serta Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	Terlaksananya penyusunan program pengembangan air tanah berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan RTRW serta Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan penyusunan program pengembangan budidaya perikanan sesuai Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS	Terlaksananya penyusunan program pengembangan budidaya perikanan sesuai Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS		
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memberikan masukan tentang muatan lokal terkait dengan program pengembangan SDA pada kurikulum pendidikan	Diterimanya masukan tentang muatan lokal terkait dengan program pengembangan SDA pada kurikulum pendidikan		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Menyediakan informasi iklim dalam penyusunan program pengembangan SDA	Tersedianya informasi iklim dalam penyusunan program pengembangan SDA		
b	Melaksanakan program pengembangan SDA dengan memadukan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan		Dinas PSDA	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pengembangan SDA	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pengembangan SDA		
			Biro Pembangunan Daerah	Mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program terpadu pengembangan SDA oleh SKPD terkait dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan	Terlaksananya koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program terpadu pengembangan SDA oleh SKPD terkait dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan		
			Bappeda	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan SDA dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan SDA dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		
			Badan Lingkungan Hidup	Memberikan masukan program pengembangan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan terkait dengan bidang lingkungan hidup	Diterimanya masukan program pengembangan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan terkait dengan bidang lingkungan hidup		
		Menerus	Dinas Pertanian TP&H	Memberikan masukan program pengembangan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan terkait dengan bidang pertanian pangan dan holtikultura	Diterimanya masukan program pengembangan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan terkait dengan bidang pertanian pangan dan holtikultura	Terwujudnya program pengembangan SDA secara terpadu dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan	
			Dinas Kehutanan	Memberikan masukan program pengembangan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan terkait dengan bidang kehutanan	Diterimanya masukan program pengembangan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan terkait dengan bidang kehutanan		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Memberikan masukan program pengembangan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan terkait dengan bidang budidaya perikanan	Diterimanya masukan program pengembangan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan terkait dengan bidang budidaya perikanan		
			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Memberikan masukan program pengembangan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan terkait dengan bidang penataan ruang	Diterimanya masukan program pengembangan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan terkait dengan bidang penataan ruang		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Memberikan masukan program pengembangan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan terkait dengan bidang pengembangan air tanah	Diterimanya masukan program pengembangan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan terkait dengan bidang pengembangan air tanah		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
c	Mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan	Menerus	Dinas PSDA	Melaksanakan pengembangan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri	Terlaksananya pengembangan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk rumah tangga, perkotaan, dan industri	
			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana transmisi air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana transmisi air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pengembangan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri yang berasal dari air tanah	Terlaksananya pengembangan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri yang berasal dari air tanah		
d	Melakukan upaya pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka peningkatan layanan penyediaan air minum untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya 78 % layanan di perkotaan dan 62% layanan di perdesaan pada tahun 2015	Menerus	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Melaksanakan pengembangan prasarana dan sarana penyediaan air minum di perkotaan dan perdesaan termasuk pulau dan daerah terpencil di Jawa Tengah	Terlaksananya pengembangan prasarana dan sarana penyediaan air minum di perkotaan dan perdesaan termasuk pulau dan daerah terpencil di Jawa Tengah	Terwujudnya peningkatan layanan penyediaan air minum untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
			Dinas PSDA	Melaksanakan pengembangan prasarana penyediaan air baku untuk air minum yang berasal dari air permukaan	Terlaksananya pengembangan prasarana penyediaan air baku untuk air minum yang berasal dari air permukaan		
			Dinas Kesehatan	1) Melaksanakan metode pendekatan partisipatif untuk merubah perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 2) Melaksanakan pengawasan kualitas air minum secara eksternal sesuai peraturan Menteri Kesehatan	Terlaksananya metode pendekatan partisipatif untuk merubah perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Terlaksananya pengawasan kualitas air minum secara eksternal sesuai peraturan Menteri Kesehatan		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pengeboran air tanah di daerah sulit air untuk penyediaan air bersih	Terlaksananya pengeboran air tanah di daerah sulit air untuk penyediaan air bersih		
e	Meningkatkan pengembangan SDA termasuk sumber air irigasi alternatif skala kecil dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan nasional, serta produksi pertanian lainnya	Menerus	Dinas PSDA	Melaksanakan pengembangan jaringan irigasi skala kecil	Terlaksananya pengembangan jaringan irigasi skala kecil	Meningkatnya pengembangan SDA termasuk jaringan irigasi skala kecil dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan nasional, serta produksi pertanian lainnya	
			Dinas Pertanian TP&H	Mengembangkan pemanfaatan sumber air irigasi skala kecil untuk kegiatan budidaya pertanian	Terlaksananya pengembangan pemanfaatan sumber air irigasi skala kecil untuk kegiatan budidaya pertanian		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Menyampaikan informasi tentang kebutuhan air untuk pemenuhan kebutuhan budidaya ikan, tambak garam, dan pengolahan hasil perikanan	Diterimanya informasi tentang kebutuhan air untuk pemenuhan kebutuhan budidaya ikan, tambak garam, dan pengolahan hasil perikanan		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Menyediakan informasi iklim pada kawasan pengembangan sumber air irigasi	Tersedianya informasi iklim pada kawasan pengembangan sumber air irigasi		
f	Mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air	Menerus	Dinas PSDA	Melaksanakan pengembangan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa termasuk saluran yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air dan transportasi air	Terlaksananya pengembangan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa termasuk saluran yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air dan transportasi air	Meningkatnya fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air	
			Bappeda	Mengkoordinasikan SKPD dan lembaga terkait dalam mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan PLTA	Terlaksananya koordinasi SKPD dan lembaga terkait dalam mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan PLTA		
			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Melaksanakan penataan, pelebaran, dan pengerukan alur sungai dan danau dengan mengutamakan aspek keselamatan operasional transportasi air	Terlaksananya penataan, pelebaran, dan pengerukan alur sungai dan danau dengan mengutamakan aspek keselamatan operasional transportasi air		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan survei potensi sumber daya air dan penelitian untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	Terlaksananya survei potensi sumber daya air dan penelitian untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Menyampaikan informasi tentang kebutuhan pemeliharaan fungsi muara sungai untuk keperluan lalu lintas kapal nelayan	Tersampainya informasi tentang kebutuhan pemeliharaan fungsi muara sungai untuk keperluan lalu lintas kapal nelayan		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
g	Menyediakan insentif bagi usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikrohidro	Menerus	Dinas PSDA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan informasi dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur PLTMH yang bersumber dari air permukaan 2) Memberikan stimulan bagi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikrohidro 3) Memberikan bantuan teknologi dan bimbingan teknis pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan PLTMH kepada masyarakat 	<p>Tersedianya informasi dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur PLTMH yang bersumber dari air permukaan</p> <p>Terlaksananya pemberian stimulan bagi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikrohidro</p> <p>Tersedianya bantuan teknologi dan bimbingan teknis pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan PLTMH kepada masyarakat</p>	Terwujudnya usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikrohidro	
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyediakan informasi dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur PLTMH yang bersumber dari air tanah	Tersedianya informasi dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur PLTMH yang bersumber dari air tanah		
h	Mendorong perseorangan atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah	Menerus	Dinas PSDA	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketersediaan air permukaan untuk pemenuhan kebutuhan air minum	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat terkait ketersediaan air permukaan untuk pemenuhan kebutuhan air minum	Terwujudnya pengembangan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari air permukaan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah	
			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pengkajian dan pengembangan model teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan 2) Melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan 	<p>Terlaksananya pengkajian dan pengembangan model teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan</p> <p>Terlaksananya pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan</p>		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat hemat air tanah	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat hemat air tanah		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan penyediaan teknologi pengolahan air minum dari bahan baku air laut	Terlaksananya penyediaan teknologi pengolahan air minum dari bahan baku air laut		
i	Menerapkan teknologi modifikasi cuaca dalam kondisi luar biasa setelah mendapat pertimbangan dari wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai dan/atau dewan sumber daya air provinsi	Menerus	Dinas PSDA	Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengatasi kelangkaan air	Terfasilitasi persiapan dan pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengatasi kelangkaan air	Meningkatnya ketersediaan air melalui pelaksanaan modifikasi cuaca	
			Bappeda	Mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan modifikasi cuaca	Terlaksananya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan modifikasi cuaca		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Menyediakan informasi cuaca untuk mendukung penerapan teknologi modifikasi cuaca	Tersedianya informasi cuaca untuk mendukung penerapan teknologi modifikasi cuaca		
5.	Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air						
a	Mengatur pengusahaan SDA berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk kesejahteraan masyarakat	Menerus sejak 2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Dinas PSDA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengusahaan SDA 2) Melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengusahaan SDA 	<p>Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengusahaan SDA</p> <p>Terlaksananya pengendalian terhadap kegiatan pengusahaan SDA</p>	Terwujudnya pengaturan pengusahaan SDA berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi	
			Badan Lingkungan Hidup	Mengevaluasi kegiatan/usaha pemanfaatan SDA, berdasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk masukan pengaturan pengusahaan SDA	Terlaksananya evaluasi kegiatan/usaha pemanfaatan SDA berdasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk masukan pengaturan pengusahaan SDA		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengusahaan air tanah	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengusahaan air tanah		
			Badan Penanaman Modal	Memberikan informasi kepada investor terkait pengusahaan SDA	Tersedianya informasi kepada investor terkait pengusahaan SDA		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcomes	Yak.
b.	Menerapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dalam pengusahaan SDA yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Dinas PSDA	1) Melaksanakan sosialisasi NSPK kepada SKPD terkait dan pemerintah kabupaten / kota 2) Melaksanakan pengendalian pengusahaan SDA sesuai dengan NSPK 3) Mengawasi penerapan NSPK	Terlaksananya pengendalian pengusahaan SDA sesuai dengan NSPK Terlaksananya sosialisasi NSPK kepada SKPD terkait dan pemerintah kabupaten / kota Terlaksananya pengawasan penerapan NSPK	Terwujudnya pengusahaan SDA yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal	
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Mensosialisasikan dan mengawasi penerapan NSPK dalam pengusahaan air tanah	Terlaksananya sosialisasi dan pengawasan penerapan NSPK dalam pengusahaan air tanah		
			Badan Lingkungan Hidup	Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pengusahaan SDA sesuai dengan NSPK terkait dengan lingkungan hidup	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian dalam pengusahaan SDA sesuai dengan NSPK terkait dengan lingkungan hidup		
			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Melakukan kegiatan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan SDA sesuai dengan NSPK terkait dengan transportasi air	Terlaksananya kegiatan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan SDA sesuai dengan NSPK terkait dengan transportasi air		
			Dinas Pariwisata	Melakukan kegiatan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan SDA sesuai dengan NSPK terkait dengan wisata air	Terlaksananya kegiatan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan SDA sesuai dengan NSPK terkait dengan wisata air		
c.	Meningkatkan peran serta perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan SDA melalui izin pengusahaan	Menerus	Dinas PSDA	Meningkatkan pelayanan dalam perizinan pengusahaan SDA	Terlaksananya peningkatan pelayanan dalam perizinan pengusahaan SDA	Terwujudnya peningkatan peran serta perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan SDA melalui proses izin pengusahaan	
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan sosialisasi pedoman perizinan tentang pengusahaan air tanah	Terlaksananya sosialisasi pedoman perizinan tentang pengusahaan air tanah		
			Bapermas	Melakukan sosialisasi tentang peran serta perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan SDA	Terlaksananya sosialisasi tentang peran serta perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan SDA		
d.	Menyusun peraturan perundang-undangan daerah untuk mengendalikan penambangan bahan mineral non logam dan batuan pada sumber air dari hulu sampai hilir guna menjaga kelestarian SDA dan lingkungan sekitar	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Dinas PSDA	Menetapkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan daerah tentang pengendalian penambangan bahan mineral non logam pada sumber air	Tersusun dan tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan daerah tentang pengendalian penambangan bahan mineral non logam pada sumber air	Terkendalinya penambangan bahan mineral bukan tambang pada sumber air	
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kriteria baku kerusakan lingkungan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kriteria baku kerusakan lingkungan		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1) Menyampaikan masukan untuk penyusunan pedoman pengendalian penambangan bahan mineral non logam dan batuan pada sumber air 2) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penambangan bahan mineral non logam dan batuan pada sumber air	Tersampainya masukan untuk penyusunan pedoman pengendalian penambangan bahan mineral non logam dan batuan pada sumber air Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penambangan bahan mineral non logam dan batuan pada sumber air		
e.	Mengalokasikan kebutuhan air untuk pengusahaan SDA sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan	Menerus	Dinas PSDA	Menetapkan dan melaksanakan rencana alokasi air untuk memenuhi berbagai kebutuhan air pada setiap sumber air sesuai dengan prioritas	Ditetapkan dan dilaksanakannya rencana alokasi air untuk memenuhi berbagai kebutuhan air pada setiap sumber air sesuai dengan prioritas	Teralokasinya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan air pada setiap sumber air sesuai dengan prioritas	
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyediakan data dan informasi potensi air tanah sebagai pertimbangan penetapan rencana alokasi/ peruntukan kebutuhan air untuk pengusahaan air tanah	Tersedianya data dan informasi potensi air tanah sebagai pertimbangan penetapan rencana alokasi/ peruntukan kebutuhan air untuk pengusahaan air tanah		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Menyediakan informasi curah hujan sebagai pertimbangan penetapan rencana alokasi kebutuhan air untuk pengusahaan SDA	Tersedianya informasi curah hujan sebagai pertimbangan penetapan rencana alokasi kebutuhan air untuk pengusahaan SDA		
f.	Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pengusahaan SDA	Menerus	Dinas PSDA	Melaksanakan pengembangan, penerapan sistem pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pengusahaan SDA secara partisipatif	Terlaksananya pengembangan, penerapan sistem pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pengusahaan SDA secara partisipatif	Terwujudnya pengembangan dan penerapan sistem pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif terhadap pengusahaan SDA	
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan RKL/RPL dan UKL/UPL	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan RKL/RPL dan UKL/UPL		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pengembangan dan penerapan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pengusahaan air tanah	Terlaksananya pengembangan dan penerapan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pengusahaan air tanah		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
IV	Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air Dan Pengurangan Dampak						
1.	Peningkatan Upaya Pencegahan						
a.	Memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai (WS)	2 thn stlh Jaknas SDA ditetapkan	Dinas PSDA	1) Memetakan kawasan rawan bencana terkait air sesuai dengan pedoman 2) Menetapkan kawasan rawan bencana terkait air sesuai dengan pedoman	Terpetaknya kawasan rawan bencana terkait air sesuai dengan pedoman Ditetapkan kawasan rawan bencana terkait air di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan pedoman	Terwujudnya peningkatan upaya pencegahan daya rusak air	
Badan Lingkungan Hidup			Menyampaikan informasi tentang kerusakan lahan untuk masukan dalam penetapan kawasan rawan bencana banjir dan longsor	Tersampainya informasi tentang kerusakan lahan untuk masukan dalam penetapan kawasan rawan bencana banjir dan longsor			
Dinas Pertanian TP&H			Menyusun cetak biru pengelolaan kekeringan di kawasan budidaya pertanian	Tersusunnya cetak biru pengelolaan kekeringan di kawasan budidaya pertanian			
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			Menetapkan zona rawan bencana geologi terkait air sesuai dengan pedoman	Ditetapkan zona rawan bencana geologi terkait air sesuai dengan pedoman			
Dinas Kelautan dan Perikanan			Menyampaikan informasi tentang sentra perikanan yang rawan bencana banjir untuk masukan bagi penetapan peta rawan bencana	Tersampainya informasi tentang sentra perikanan yang rawan bencana banjir untuk masukan bagi penetapan peta rawan bencana			
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Menetapkan dan mensosialisasikan daerah rawan bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor	Ditetapkan dan tersosialisasikannya daerah rawan bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor			
Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika			Menyediakan informasi tentang hidrometeorologi untuk masukan dalam penetapan daerah rawan banjir dan kekeringan	Tersedia informasi tentang hidrometeorologi untuk masukan dalam penetapan daerah rawan banjir dan kekeringan			
b.	Mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir	Menerus	Dinas PSDA	Melaksanakan pengintegrasian perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir	Terlaksananya pengintegrasian perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir	Terwujudnya pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir	
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang			Memberikan masukan sistem drainase kawasan produktif dan drainase perkotaan dalam perencanaan sistem pengendalian banjir	Diterimanya masukan sistem drainase kawasan produktif dan drainase perkotaan dalam perencanaan sistem pengendalian banjir			
Dinas Bina Marga			Memberikan masukan sistem drainase jalan dalam perencanaan sistem pengendalian banjir	Diterimanya masukan sistem drainase jalan dalam perencanaan sistem pengendalian banjir			
Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika			Menyediakan informasi curah hujan dalam perencanaan sistem pengendalian banjir	Tersedianya informasi curah hujan dalam perencanaan sistem pengendalian banjir			
c.	Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan	Menerus	Dinas PSDA	1) Melaksanakan sosialisasi tentang kawasan rawan banjir dan kekeringan 2) Melakukan sosialisasi pedoman dan pelatihan menghadapi banjir dan kekeringan kepada masyarakat kawasan rawan banjir dan kekeringan 3) Menyediakan prasarana pada wadah-wadah air untuk persiapan menghadapi banjir dan kekeringan	Terlaksananya sosialisasi tentang kawasan rawan banjir dan kekeringan Terlaksananya sosialisasi pedoman dan pelatihan menghadapi banjir dan kekeringan kepada masyarakat kawasan rawan banjir dan kekeringan Tersedianya prasarana pada wadah-wadah air untuk persiapan menghadapi banjir dan kekeringan	Meningkatnya kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana banjir dan kekeringan	
Dinas Pertanian TP&H			Melaksanakan sosialisasi pedoman tentang adaptasi terhadap banjir dan kekeringan terkait budidaya pertanian	Terlaksananya sosialisasi pedoman tentang adaptasi terhadap banjir dan kekeringan terkait budidaya pertanian			
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Menyediakan prasarana dan sarana untuk persiapan menghadapi banjir dan kekeringan	Tersedianya prasarana dan sarana untuk persiapan menghadapi banjir dan kekeringan			
Badan Pemberdayaan Masyarakat			Melaksanakan sosialisasi pedoman tentang adaptasi terhadap banjir dan kekeringan terkait aspek sosial	Terlaksananya sosialisasi pedoman tentang adaptasi terhadap banjir dan kekeringan terkait aspek sosial			
Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika			Menyebarkan informasi tentang keterkaitan intensitas curah hujan terhadap kejadian banjir dan kekeringan	Terlaksananya Penyebarluasan informasi tentang keterkaitan intensitas curah hujan terhadap kejadian banjir dan kekeringan			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket	
d	Mempraksaisi pembentukan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu, tengah dan hilir dalam pengendalian daya rusak air	Menerus	Dinas PSDA	1) Memberikan masukan pelaksanaan pola kerjasama pada wilayah sungai dalam pengendalian daya rusak air 2) Memfasilitasi pelaksanaan pola kerjasama yang efektif	Disampaikannya masukan pelaksanaan pola kerjasama pada wilayah sungai dalam pengendalian daya rusak air Terfasilitasinya pelaksanaan pola kerjasama yang efektif	Terwujudnya pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu, tengah dan hilir dalam pengendalian daya rusak air		
			Biro Kerjasama	Melakukan fasilitasi pembentukan pola kerjasama antara daerah hulu, tengah dan hilir dalam pengendalian daya rusak air	Terlaksananya fasilitasi pembentukan pola kerjasama antara daerah hulu, tengah dan hilir dalam pengendalian daya rusak air			
			Badan Lingkungan Hidup	1) Memfasilitasi pembentukan pola kerjasama antardaerah kawasan hulu, tengah dan hilir dalam pengelolaan lingkungan hidup 2) Memfasilitasi pelaksanaan pola kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup	Terfasilitasinya pembentukan pola kerjasama antardaerah kawasan hulu, tengah dan hilir dalam pengelolaan lingkungan hidup Terfasilitasinya pelaksanaan pola kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup			
			Dinas Kehutanan	1) Melaksanakan koordinasi antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan kawasan hutan untuk pengendalian daya rusak air 2) Memfasilitasi dan/atau melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan kawasan hutan untuk pengendalian daya rusak air	Terlaksananya koordinasi antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan kawasan hutan untuk pengendalian daya rusak air Terfasilitasinya dan terlaksananya kerjasama dalam pengelolaan kawasan hutan untuk pengendalian daya rusak air			
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan koordinasi antara daerah imbuhan dan daerah lepasan dalam pengelolaan CAT lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi antara daerah imbuhan dan daerah lepasan dalam pengelolaan CAT lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota			
e	Meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan	Menerus	Dinas Kehutanan	Melaksanakan program dalam meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan	Terlaksananya program dalam meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan	Terwujudnya peningkatan kelestarian fungsi hutan		
			Dinas PSDA	Memelihara fungsi hutan di area sabuk hijau waduk dan sempadan sumber air	Tepeliharanya fungsi hutan di area sabuk hijau waduk dan sempadan sumber air			
			Dinas Pertanian TP&H	Melaksanakan optimasi pemanfaatan lahan kering dengan budidaya tanaman keras untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan	Terlaksananya optimasi pemanfaatan lahan kering dengan budidaya tanaman keras untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan			
			Dinas Perkebunan	Melaksanakan optimasi pemanfaatan lahan perkebunan dengan budidaya tanaman keras untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan	Terlaksananya optimasi pemanfaatan lahan perkebunan dengan budidaya tanaman keras untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan			
f	Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara	Menerus	Dinas PSDA	a) Menyusun dan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan tentang pemanfaatan bantaran sungai b) Melaksanakan penertiban pemanfaatan bantaran sungai	Tersusun dan terlaksananya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan tentang pemanfaatan bantaran sungai Terlaksananya penertiban pemanfaatan bantaran sungai	Terwujudnya pemanfaatan bantaran sungai sesuai dengan peruntukan		
				Badan Pemberdayaan Masyarakat	Memberikan dukungan sosialisasi dan penyuluhan tentang pemanfaatan bantaran sungai			Diterimanya dukungan sosialisasi dan penyuluhan tentang pemanfaatan bantaran sungai
f	Menertibkan penggunaan daerah sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan	Menerus	Dinas PSDA	a) Menyusun dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang penggunaan daerah sempadan sungai b) Melaksanakan penegakan hukum dalam penertiban penggunaan daerah sempadan sungai	Tersusun dan terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah tentang penggunaan daerah sempadan sungai Terlaksananya penegakan hukum dalam penertiban penggunaan daerah sempadan sungai	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan daerah sempadan sungai		
				Satpol PP	Membantu pelaksanaan penertiban pemanfaatan bantaran sungai			Diterimanya bantuan pelaksanaan penertiban pemanfaatan bantaran sungai
				Satpol PP	Membantu pelaksanaan penertiban penggunaan daerah sempadan sungai			Diterimanya bantuan pelaksanaan penertiban penggunaan daerah sempadan sungai

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
3)	Meningkatkan penyebaran informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana yang terkait air	Menerus	Dinas PSDA	Menyebarkan informasi kawasan retensi banjir dan kawasan rawan kekeringan	Tertindakannya penyebaran informasi kawasan retensi banjir dan kawasan rawan kekeringan	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana terkait air	
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyebarkan informasi kawasan rawan tanah longsor	Tertindakannya penyebaran informasi kawasan rawan tanah longsor		
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menyebarkan informasi kawasan rawan bencana terkait air	Tertindakannya penyebaran informasi kawasan rawan bencana terkait air		
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan penyebaran informasi mengenai dampak lingkungan hidup akibat bencana terkait air	Tertindakannya penyebaran informasi mengenai dampak lingkungan hidup akibat bencana terkait air		
			Dinas Kesehatan	Melaksanakan penyebaran informasi mengenai penanganan penyakit pada kawasan rawan bencana terkait air	Tertindakannya penyebaran informasi mengenai penanganan penyakit kawasan rawan bencana terkait air		
Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Menyebarkan informasi prakiraan intensitas curah hujan dan peringatan dini cuaca / iklim pada kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana terkait air	Tersebar nya informasi prakiraan intensitas curah hujan dan peringatan dini cuaca / iklim pada kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana terkait air					
4)	Meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air	Menerus	Dinas PSDA	Melakukan sosialisasi dan simulasi kesiap-siagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air	Tertindakannya sosialisasi dan simulasi kesiap-siagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air	Terwujudnya kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air	
			Dinas Kesehatan	Melaksanakan roadmap adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan yang terkait air dengan cara : a) Pemantauan penyakit akibat perubahan iklim; b) Penyebaran hasil pemantauan kepada para pemilik kepentingan c) Perbaikan kualitas lingkungan	Pemantauan penyakit akibat perubahan iklim; Penyebaran hasil pemantauan kepada para pemilik kepentingan Perbaikan kualitas lingkungan		
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Memfasilitasi perbaikan kerusakan infrastruktur akibat perubahan iklim global dan daya rusak air	Tertindakannya perbaikan kerusakan infrastruktur akibat perubahan iklim global dan daya rusak air		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi dampak perubahan iklim dan kondisi iklim ekstrim	Tertindakannya sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi dampak perubahan iklim dan kondisi iklim ekstrim		
9	Melakukan pengendalian aliran air di sumber air, dengan cara 1) Meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan						
Menerus	Meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan	Menerus	Dinas PSDA	a) Melakukan penyusunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah yang mendukung upaya peningkatan resapan air b) Melaksanakan penerapan hasil pengembangan teknologi imbuhan buatan untuk mengendalikan air permukaan c) Melaksanakan program percontohan sumur resapan dan biopori serta memberikan stimulan pembuatan sumur resapan dan biopori kepada masyarakat d) Melaksanakan penegakan hukum dalam upaya mengurangi aliran permukaan	Tertindakannya penyusunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah yang mendukung upaya peningkatan resapan air Tertindakannya penerapan hasil pengembangan teknologi imbuhan buatan untuk mengendalikan air permukaan Tertindakannya program percontohan dan pemberian stimulan pembuatan sumur resapan dan biopori Tertindakannya penegakan hukum dalam upaya mengurangi aliran permukaan	Meningkatnya resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan	
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pembuatan model percontohan sumur resapan dan lubang resapan biopori	Tertindakannya pembuatan model percontohan sumur resapan dan lubang resapan biopori		
			Dinas Pertanian TP&H	Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat petani untuk meningkatkan resapan air ke dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan (terasering)	Tertindakannya pembinaan kepada masyarakat petani untuk meningkatkan resapan air ke dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan (terasering)		
			Dinas Kehutanan	Melaksanakan sosialisasi, dan penyuluhan tentang pengendalian aliran permukaan kepada masyarakat dan pelaku usaha di dalam dan disekitar kawasan hutan	Tertindakannya sosialisasi, dan penyuluhan tentang pengendalian aliran permukaan kepada masyarakat dan pelaku usaha di dalam dan disekitar kawasan hutan		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan sosialisasi pedoman tentang sistem imbuhan air tanah kepada pemilik kepentingan	Tertindakannya sosialisasi pedoman tentang sistem imbuhan air tanah kepada pemilik kepentingan		

No	Kategori dan Subkategori	Tujuan Utama	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan, Bahan, dan Sasaran yang Dituju	Output	Indikator	Ket
1	Menyediakan kawasan pengendali banjir dan kawasan air oleh para pemilik lahan/lingkungan	Menyusun	Dinas PDRB	Mengadakan informasi awal bagi dan pembahasan land-use zoning yang berkaitan dengan rencana di	Tersebutnya informasi awal bagi dan pembahasan land-use zoning yang berkaitan dengan rencana di		
			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Mengadakan pertemuan dengan dan pembahasan rencana di rencana pembangunan	Tersebutnya pembahasan dengan dan pembahasan rencana di rencana pembangunan		
			Badan Lingkungan Hidup	Mengadakan pertemuan, koordinasi dan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan	Tersebutnya pembahasan, koordinasi dan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan	Menyediakan kawasan pengendali banjir dan kawasan air	
			Badan Melindungi Masyarakat Dan Cendekiawan	Mengadakan informasi awal bagi dan pembahasan land-use zoning yang berkaitan dengan rencana di	Tersebutnya informasi awal bagi dan pembahasan land-use zoning yang berkaitan dengan rencana di		
2	Menyediakan kawasan yang memiliki fungsi utama banjir sebagai kawasan pengendali banjir	Din. dan Dinas SDA & Wilayah	Dinas PDRB	Mengadakan pertemuan dengan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan	Tersebutnya pembahasan dengan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan		
			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Mengadakan pertemuan dengan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan	Tersebutnya pembahasan dengan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan	Tersebutnya kawasan yang memiliki fungsi utama banjir sebagai kawasan pengendali banjir	
			Badan Melindungi Masyarakat Dan Cendekiawan	Mengadakan informasi awal bagi dan pembahasan land-use zoning yang berkaitan dengan rencana di	Tersebutnya informasi awal bagi dan pembahasan land-use zoning yang berkaitan dengan rencana di		
3	Menyediakan kawasan yang memiliki fungsi utama banjir sebagai kawasan pengendali banjir oleh para pemilik lahan/lingkungan	Menyusun	Dinas PDRB	Mengadakan pertemuan dengan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan	Tersebutnya pembahasan dengan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan		
			Badan Lingkungan Hidup	Mengadakan pertemuan dengan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan	Tersebutnya pembahasan dengan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan	Tersebutnya kawasan yang memiliki fungsi utama banjir sebagai kawasan pengendali banjir	
			Dinas Ketahanan / Forum Perhutani / DPN dan PDRB	1) Mengadakan dan rencana kawasan hutan yang memiliki fungsi utama banjir 2) Menetapkan penyusunan rencana fungsi utama banjir di kawasan hutan kepada para pemilik lahan/lingkungan	Tersebutnya penyusunan rencana fungsi utama banjir di kawasan hutan kepada para pemilik lahan/lingkungan		
4	Menyediakan program pengendalian banjir untuk melindungi kawasan permukiman dan kawasan produktif	Menyusun	Dinas PDRB	Mengadakan pertemuan dan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan	Tersebutnya pembahasan dengan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan		
			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Mengadakan pertemuan dan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan	Tersebutnya pembahasan dengan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan	Tersebutnya program pengendalian banjir untuk melindungi kawasan permukiman dan kawasan produktif	
			Dinas Perencanaan TPAH	Mengadakan dan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan	Tersebutnya pembahasan dengan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan		
			Dinas Ketahanan	Mengadakan pertemuan dan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan	Tersebutnya pembahasan dengan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan		
2	Peningkatan Iptu Penanggulangan						
4	Menetapkan mekanisme penanggulangan kerubut dan/atau bencana akibat daya rusak air	Din. dan Dinas SDA & Wilayah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas PDRB	Mengadakan dan pembahasan rencana pembangunan rencana pembangunan Menetapkan mekanisme dalam penyusunan SOP penanggulangan kerubut dan/atau bencana akibat daya rusak air	Tersebut dan ditetapkan SOP penanggulangan kerubut dan/atau bencana akibat daya rusak air Ditentukan mekanisme dalam penyusunan SOP penanggulangan kerubut dan/atau bencana akibat daya rusak air	Ditentukan SOP penanggulangan kerubut dan/atau bencana akibat daya rusak air	

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
b	Melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air	Menerus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas PSDA	Melaksanakan sosialisasi SOP penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air Melaksanakan sosialisasi SOP penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air kepada masyarakat disekitar wadah-wadah air	Terlaksananya sosialisasi SOP penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air Terlaksananya sosialisasi SOP penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air kepada masyarakat disekitar wadah-wadah air	Meningkatnya pemahaman tentang mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air	
c	Mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana terkait air	Menerus	Dinas PSDA Dinas Pertanian TP&H Dinas Kehutanan / Perum Perhutani / BP DAS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Badan Lingkungan Hidup	Mengembangkan dan menerapkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana terkait air Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada budidaya pertanian 1) Membangun stasiun pengamat arus sungai (SPAS) telemetri di kawasan hutan di wilayah hulu DAS untuk keperluan prakiraan dan peringatan dini 2) Melaksanakan pemantauan SPAS dan menyampaikan informasi kepada instansi pengelola sungai 1) Melaksanakan pemantauan muka air tanah dan kualitas air tanah 2) Mencegah pengambilan air tanah pada zona rusak dan mengurangi pengambilan air tanah pada zona kritis 1) Melaksanakan penerapan teknologi sistem prakiraan dan peringatan dini bencana terkait air 2) Melaksanakan kerjasama dalam penerapan hasil pengembangan teknologi sistem peringatan dini bencana terkait air Menyediakan informasi cuaca dan iklim ekstrim dan prakiraan daerah potensi banjir, serta memberikan peringatan dini cuaca/iklim ekstrim Melaksanakan pengembangan sistem peringatan dini bencana daya rusak air melalui penetapan parameter kunci kualitas dan kuantitas air	Terlaksananya pengembangan dan diterapkannya sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada budidaya pertanian Terbangunnya stasiun pengamat arus sungai (SPAS) telemetri di kawasan hutan di wilayah hulu DAS untuk keperluan prakiraan dan peringatan dini Terlaksananya pemantauan SPAS dan menyampaikan informasi kepada instansi pengelola sungai Terlaksananya pemantauan muka air tanah dan kualitas air tanah Terlaksananya pencegahan pengambilan air tanah pada zona rusak dan mengurangi pengambilan air tanah pada zona kritis Terlaksananya penerapan teknologi sistem prakiraan dan peringatan dini bencana terkait air Terlaksananya kerjasama dalam penerapan hasil pengembangan teknologi sistem peringatan dini bencana terkait air Tersedianya informasi cuaca dan iklim ekstrim dan prakiraan daerah potensi banjir Terlaksananya pengembangan sistem peringatan dini bencana daya rusak air melalui penetapan parameter kunci kualitas dan kuantitas air	Diterapkannya sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana terkait air	
d	Meningkatkan pengetahuan, kesiap-siagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air	Menerus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas PSDA Dinas Kesehatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Melaksanakan sosialisasi, simulasi, dan peragaan kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air 1) Memberikan masukan terhadap cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air 2) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara antisipasi bencana akibat daya rusak air Melaksanakan sosialisasi, simulasi, dan praktek kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air di bidang kesehatan Menyusun modul dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air tanah, tanah longsor dan banjir lahar dingin Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara antisipasi bencana akibat daya rusak air agar menumbuhkan sikap kemandirian dalam menghadapi bencana Melaksanakan sosialisasi pada masyarakat tentang kondisi cuaca dan iklim yang berpotensi menimbulkan bencana akibat daya rusak air	Terlaksananya sosialisasi, simulasi, dan peragaan kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air Diterimanya masukan terhadap cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara antisipasi bencana akibat daya rusak air Terlaksananya sosialisasi, simulasi, dan praktek kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air di bidang kesehatan Tersusunnya modul dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara penanggulangan bencana akibat daya rusak air tanah, tanah longsor dan banjir lahar dingin Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara antisipasi bencana akibat daya rusak air agar menumbuhkan sikap kemandirian dalam menghadapi bencana Terlaksananya sosialisasi pada masyarakat tentang kondisi cuaca dan iklim yang berpotensi menimbulkan bencana akibat daya rusak air	Terwujudnya kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air	

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
e	Memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air	Menerus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan sinergitas sistem dan pendayagunaan sumber daya lokal untuk peningkatan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air 2) Melaksanakan perbaikan sistem untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan bencana akibat daya rusak air 3) Meningkatkan kapasitas untuk memperbaiki kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air 	<p>Terlaksananya sinergitas sistem dan pendayagunaan sumber daya lokal untuk peningkatan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air</p> <p>Terlaksananya perbaikan sistem untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan bencana akibat daya rusak air</p> <p>Meningkatnya kapasitas untuk memperbaiki kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air</p>	Terwujudnya kinerja dan sinergitas dalam penanggulangan bencana akibat daya rusak air	
		Dinas PSDA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan masukan perbaikan sistem untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan bencana akibat daya rusak air 2) Meningkatkan kapasitas untuk memperbaiki kinerja dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana akibat daya rusak air 	<p>Diterimanya masukan perbaikan sistem untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan bencana akibat daya rusak air</p> <p>Meningkatnya kapasitas untuk memperbaiki kinerja dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana akibat daya rusak air</p>			
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan perbaikan sistem penanggulangan bencana akibat daya rusak air tanah yang berbasis konservasi	Terlaksananya perbaikan sistem penanggulangan bencana akibat daya rusak air tanah yang berbasis konservasi			
		Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Meningkatkan peranserta dan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyampaian informasi/peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana akibat daya rusak air	Meningkatnya peranserta dan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyampaian informasi/peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana akibat daya rusak air			
f	Menyusun sistem penganggaran kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air yang bersumber dan dana APBN dan/ atau APBD serta sumber dana lain	1 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menyusun dan melaksanakan sistem penganggaran untuk penanggulangan darurat akibat daya rusak air	Tersusun dan dilaksanakannya sistem penganggaran untuk penanggulangan darurat akibat daya rusak air	Tersedianya anggaran untuk penanggulangan darurat akibat daya rusak air	
		Bappeda	Mengkoordinasikan SKPD terkait untuk menyusun sistem penganggaran kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air	Terlaksananya koordinasi SKPD terkait untuk menyusun sistem penganggaran kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air			
		Dinas PSDA	Memberikan masukan untuk penyusunan sistem penganggaran kondisi darurat terkait daya rusak air	Diterimanya masukan untuk penyusunan sistem penganggaran kondisi darurat terkait daya rusak air			
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Memberikan masukan untuk penyusunan sistem penganggaran kondisi darurat terkait daya rusak air tanah, tanah longsor dan banjir lahar dingin	Diterimanya masukan untuk penyusunan sistem penganggaran kondisi darurat terkait daya rusak air tanah, tanah longsor dan banjir lahar dingin			
3.	Peningkatan Upaya Pemulihan						
a	Merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumber daya air dan memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam APBN/APBD, dan sumber dana lainnya	Menerus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menyusun dan melaksanakan program dengan mengalokasikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana akibat daya rusak air serta pemulihan fungsi lingkungan	Tersusun dan terlaksananya program dengan mengalokasikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana akibat daya rusak air serta pemulihan fungsi lingkungan	Terwujudnya pemulihan prasarana sumber daya air dan fungsi lingkungan akibat daya rusak air	
		Dinas PSDA	Menyusun program dan anggaran serta melaksanakannya sesuai dengan tingkat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana sumber daya air	Tersusunnya program dan anggaran serta melaksanakannya sesuai dengan tingkat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana sumber daya air			
		Badan Lingkungan Hidup	Menyusun program dan anggaran serta melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan akibat daya rusak air sesuai dengan tingkat kebutuhan	Tersusunnya program dan anggaran serta terlaksanakannya pemulihan fungsi lingkungan akibat daya rusak air sesuai dengan tingkat kebutuhan			
		Dinas Kehutanan	Menyusun program dan anggaran serta melaksanakan pemulihan hutan akibat daya rusak air sesuai dengan tingkat kebutuhan	Tersusunnya program dan anggaran serta terlaksanakannya pemulihan hutan akibat daya rusak air sesuai dengan tingkat kebutuhan			
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Mengalokasikan dana untuk perbaikan jaringan sumur pantau dan pembuatan sumur imbuhan akibat daya rusak air	Tersedianya alokasi dana untuk perbaikan jaringan sumur pantau dan pembuatan sumur imbuhan akibat daya rusak air			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
b.	Mengembangkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak air	Menerus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menyusun model peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan efektifitas pemulihan fungsi infrastruktur akibat bencana daya rusak air	Tersusunnya model peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan efektifitas pemulihan fungsi infrastruktur akibat bencana daya rusak air	Terwujudnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan fisik dan non fisik akibat bencana daya rusak air	
			Badan Pemberdayaan Masyarakat	Melaksanakan pengembangan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan akibat bencana daya rusak air	Terlaksananya pengembangan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan akibat bencana daya rusak air		
			Dinas PSDA	Memberikan masukan dalam penyusunan model peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan efektifitas pemulihan fungsi infrastruktur akibat bencana daya rusak air	Diterimanya masukan dalam penyusunan model peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan efektifitas pemulihan fungsi infrastruktur akibat bencana daya rusak air		
			Badan Lingkungan Hidup	1) Menyusun rencana pemulihan kualitas lingkungan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha 2) Menyampaikan rekomendasi rencana pemulihan kualitas lingkungan kepada SKPD terkait	Tersusunnya rencana pemulihan kualitas lingkungan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha Tersampainya rekomendasinya rencana pemulihan kualitas lingkungan kepada SKPD terkait		
			Dinas Kesehatan	Menjalini kerjasama dengan masyarakat serta dunia usaha yang terkoordinasi untuk pemulihan kesehatan akibat bencana daya rusak air	Terjalinnnya kerjasama dengan masyarakat serta dunia usaha yang terkoordinasi untuk pemulihan kesehatan akibat bencana daya rusak air		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menjalini kerjasama dengan masyarakat serta dunia usaha yang terkoordinasi untuk pemulihan prasarana air tanah akibat bencana daya rusak air	Terjalinnnya kerjasama dengan masyarakat serta dunia usaha yang terkoordinasi untuk pemulihan prasarana air tanah akibat bencana daya rusak air		
c.	Memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air oleh para pemilik kepentingan	Menerus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melaksanakan pemulihan dampak sosial dan psikologis terhadap korban bencana terkait air	Terlaksananya pemulihan dampak sosial dan psikologis korban bencana oleh para pemilik kepentingan	Terwujudnya pemulihan dampak sosial dan psikologis korban bencana	
			Dinas Kesehatan	Melaksanakan pemulihan dampak psikologis terhadap para korban bencana terkait air	Terlaksananya pemulihan dampak psikologis terhadap para korban bencana terkait air		
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pemulihan dampak sosial dan psikologis	Terlaksananya peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pemulihan dampak sosial dan psikologis		
			Dinas Sosial	Mengkoordinasikan, menyalurkan dan mengevaluasi bantuan terkait bencana akibat sumber daya air untuk pemulihan dampak sosial dan psikologis	Terkoordinasi, tersalurkan dan terevaluasinya bantuan terkait bencana akibat sumber daya air untuk pemulihan dampak sosial dan psikologis		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
V	Kebijakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan SDA						
1.	Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan						
a.	Meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air (SDA)		Menerus	<p>Dinas PSDA Melaksanakan sosialisasi dan kampanye kepedulian masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air (SDA)</p> <p>Badan Lingkungan Hidup Melaksanakan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kepedulian publik mengenai pentingnya keselarasan fungsi lingkungan hidup dari sumber daya air (SDA)</p> <p>Dinas Pertanian TP&H Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pengembangan pola budidaya pertanian ramah lingkungan untuk keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air (SDA)</p> <p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pelaku industri dalam menyelaraskan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air (SDA)</p> <p>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Melaksanakan sosialisasi dan kampanye kepedulian publik terhadap fungsi air tanah dalam lingkungan hidup</p> <p>Badan Pemberdayaan Masyarakat Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air (SDA)</p>	<p>Terlaksananya sosialisasi dan kampanye kepedulian masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air (SDA)</p> <p>Terlaksananya sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kepedulian publik mengenai pentingnya keselarasan fungsi lingkungan hidup dari sumber daya air (SDA)</p> <p>Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, dan pengembangan pola budidaya pertanian ramah lingkungan untuk keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air (SDA)</p> <p>Terlaksananya pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pelaku industri dalam menyelaraskan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air (SDA)</p> <p>Terlaksananya sosialisasi dan kampanye kepedulian publik terhadap fungsi air tanah dalam lingkungan hidup</p> <p>Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air (SDA)</p>	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari SDA	
b.	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA		Menerus	<p>Dinas PSDA Melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA</p> <p>Dinas Kesehatan Membangun jejaring kerjasama dengan pemilik kepentingan untuk memperoleh masukan terkait bidang kesehatan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan SDA</p> <p>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Melaksanakan konsultasi publik sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan SDA</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatkan keterlibatan lembaga pendidikan untuk memperoleh masukan terkait bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan SDA</p>	<p>Berperannya masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA</p> <p>Terbangunnya jejaring kerjasama dengan pemilik kepentingan untuk memperoleh masukan terkait bidang kesehatan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan SDA</p> <p>Terlaksananya konsultasi publik sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan SDA</p> <p>Meningkatnya keterlibatan lembaga pendidikan untuk memperoleh masukan terkait bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan SDA</p>	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SDA	
c.	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat wilayah sungai (WS)		Menerus	<p>Dinas PSDA Meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA tingkat WS melalui TKPSDA WS</p> <p>Dinas Kehutanan Meningkatkan peranserta masyarakat dan pelaku usaha sektor kehutanan dalam pengumpulan masukan untuk menyusun pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat WS</p> <p>Dinas Pertanian TP&H Meningkatkan peranserta masyarakat dan pelaku usaha sektor budidaya pertanian dalam pengumpulan masukan untuk menyusun pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat WS</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatkan peran lembaga pendidikan dalam pengumpulan masukan untuk menyusun pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di tingkat WS</p> <p>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan masukan terkait air tanah untuk menyusun pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di tingkat WS</p>	<p>Meningkatnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA tingkat WS melalui TKPSDA WS</p> <p>Meningkatnya peranserta masyarakat dan pelaku usaha sektor kehutanan dalam pengumpulan masukan untuk menyusun pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat WS</p> <p>Meningkatnya peranserta masyarakat dan pelaku usaha sektor budidaya pertanian dalam pengumpulan masukan untuk menyusun pola dan rencana pengelolaan SDA di tingkat WS</p> <p>Meningkatnya peran lembaga pendidikan dalam pengumpulan masukan untuk menyusun pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di tingkat WS</p> <p>Meningkatnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan masukan terkait air tanah untuk menyusun pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di tingkat WS</p>	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS	

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket	
d.	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan SDA oleh para pemilik kepentingan	Menerus	Dinas PSDA	Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan serta dalam perencanaan pengelolaan SDA	Terlaksananya bimbingan teknis dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan serta dalam perencanaan pengelolaan SDA	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pengelolaan SDA		
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan bimbingan teknis kepada masyarakat tentang lingkungan hidup agar mampu berperan serta dalam perencanaan pengelolaan SDA	Terlaksananya bimbingan teknis kepada masyarakat tentang lingkungan hidup agar mampu berperan serta dalam perencanaan pengelolaan SDA			
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada masyarakat tentang pengelolaan air tanah agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air	Terlaksananya bimbingan teknis dan pendampingan kepada masyarakat tentang pengelolaan air tanah agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air			
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan peran lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan serta dalam perencanaan pengelolaan SDA	Meningkatnya peran lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan serta dalam perencanaan pengelolaan SDA			
2.	Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan							
a.	Membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Menerus	Dinas PSDA	Menyediakan sistem untuk menampung masukan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Tersedianya sistem untuk menampung masukan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Terbukanya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan SDA		
			Badan Lingkungan Hidup	Menyediakan sistem untuk menampung masukan masyarakat dan dunia usaha terkait dengan lingkungan hidup untuk memperoleh masukan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Tersedianya sistem untuk menampung masukan masyarakat dan dunia usaha terkait dengan lingkungan hidup untuk memperoleh masukan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA			
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyediakan sistem untuk menampung masukan masyarakat dan dunia usaha terkait dengan air tanah untuk memperoleh masukan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Tersedianya sistem untuk menampung masukan masyarakat dan dunia usaha terkait dengan air tanah untuk memperoleh masukan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA			
b.	Memberikan kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan	Menerus	Dinas PSDA	1) Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan partisipatif kepada masyarakat dan dunia usaha 2) Meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan sesuai pedoman	Terlaksananya sosialisasi pedoman pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan partisipatif kepada masyarakat dan dunia usaha Meningkatnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan sesuai pedoman	Meningkatnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan		
			Dinas Pertanian TP&H	Melaksanakan pemberdayaan partisipatif kepada petani pemakai air dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	Terlaksananya pemberdayaan partisipatif kepada petani pemakai air dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier			
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi prasarana air tanah serta operasi dan pemeliharaan sesuai dengan pedoman	Meningkatnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan konstruksi prasarana air tanah serta operasi dan pemeliharaan sesuai dengan pedoman			
c.	Mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pengelolaan SDA	Menerus	Dinas PSDA	1) Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pengelolaan SDA 2) Memfasilitasi peranserta masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pengelolaan SDA	Terlaksananya sosialisasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pengelolaan SDA Terfasilitasinya peranserta masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pengelolaan SDA	Meningkatnya kontribusi masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pengelolaan SDA		
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan kajian evaluasi ekonomi lingkungan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan tentang kontribusi dari masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pengelolaan SDA	Terlaksananya kajian evaluasi ekonomi lingkungan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan tentang kontribusi dari masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pengelolaan SDA			
			Dinas Kehutanan	1) Menyusun dan mensosialisasikan peraturan tentang jasa lingkungan hutan terkait air dalam pembiayaan pengelolaan SDA 2) Melaksanakan jasa lingkungan hutan terkait air dalam pembiayaan pengelolaan SDA	Tersusun dan tersosialisasikannya peraturan tentang jasa lingkungan hutan terkait air dalam pembiayaan pengelolaan SDA Terlaksananya jasa lingkungan hutan terkait air dalam pembiayaan pengelolaan SDA			
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Memfasilitasi peranserta masyarakat dan dunia usaha melalui penyediaan data dan informasi pengelolaan air tanah	Terfasilitasinya peranserta masyarakat dan dunia usaha melalui penyediaan data dan informasi pengelolaan air tanah			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
d.	Meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air dengan cara memberikan insentif kepada yang telah berprestasi	Menerus	Dinas PSDA	Menerapkan mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi	Diterapkannya mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi	Meningkatnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air	
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Memberi penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha yang berperanserta dalam kegiatan konservasi dan pengendalian daya rusak air tanah	Diterimanya penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha yang berperanserta dalam kegiatan konservasi dan pengendalian daya rusak air tanah		
e.	Menyiapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengelolaan SDA	2 thn sth Jaknas SDA di tetapkan	Dinas PSDA	Melaksanakan instrumen kebijakan dalam bentuk layanan perizinan satu atap bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Terlaksananya instrumen kebijakan dalam bentuk layanan perizinan satu atap bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA	
			Bappeda	Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan berkaitan dengan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA	Tersusunnya kebijakan perencanaan pembangunan berkaitan dengan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA		
			Badan Lingkungan Hidup	Mensosialisasikan kebijakan dan/atau peraturan tentang pengelolaan kualitas air yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha	Tersosialisasinya kebijakan dan/atau peraturan tentang pengelolaan kualitas air yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha		
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Mensosialisasikan kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat pelaku industri dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Tersosialisasikannya kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat pelaku industri dalam pelaksanaan pengelolaan SDA		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Mensosialisasikan kebijakan dan/atau peraturan tentang air tanah yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha	Tersosialisasikannya kebijakan dan/atau peraturan tentang air tanah yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha		
f.	Mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan, peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA	Menerus	Dinas PSDA	Melaksanakan pengembangan dan keterpaduan pemberdayaan, peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA	Terlaksananya pengembangan dan keterpaduan pemberdayaan, peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA	Terwujudnya keterpaduan pemberdayaan, peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA	
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pengembangan dan keterpaduan pemberdayaan, peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air tanah	Terlaksananya pengembangan dan keterpaduan pemberdayaan, peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air tanah		
g.	Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengelolaan SDA oleh para pemilik kepentingan	Menerus	Dinas PSDA	Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Terlaksananya pendidikan, pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan SDA	
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengelolaan SDA terkait lingkungan hidup	Terlaksananya pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengelolaan SDA terkait lingkungan hidup		
			Dinas Pertanian TP&H	Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sekolah lapang serta penyuluhan dalam pengelolaan air irigasi	Terfasilitasinya pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sekolah lapang serta penyuluhan dalam pengelolaan air irigasi		
			Dinas Kesehatan	Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan SDA terkait kesehatan	Terlaksananya pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan SDA terkait kesehatan		
			Dinas Kehutanan	Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat di kawasan dan sekitar hutan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Terlaksananya pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat di kawasan dan sekitar hutan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan		
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memasukan pemahaman pengelolaan SDA dalam materi ajar sebagai wujud pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Dimasukkannya pemahaman pengelolaan SDA dalam materi ajar sebagai wujud pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
3.	Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan						
a	Membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan SDA dalam bentuk pelaporan dan pengaduan		Menerus	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan SDA berbasis web dan kolak pos Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait teknologi pengelolaan SDA 	<p>Tersedianya sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan SDA</p> <p>Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait teknologi pengelolaan SDA</p>	Terbukanya kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA dalam bentuk pelaporan dan pengaduan	
		Badan Lingkungan Hidup	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA			
		Dinas Kesehatan	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait kesehatan	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait kesehatan			
		Dinas Kehutanan	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait kehutanan	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait pengelolaan kawasan hutan			
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan pelaku industri terkait pengelolaan SDA	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan pelaku industri terkait pengelolaan SDA			
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan air tanah	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan air tanah			
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait budidaya perikanan dan kerusakan pantai	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait budidaya perikanan dan kerusakan pantai			
		Dinas Pertanian TP&H	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi di jaringan tersier	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha terkait budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi di jaringan tersier			
		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Menyediakan fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait transportasi air	Tersedianya fasilitas penerima laporan dan pengaduan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait transportasi air			
b	Menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA	2 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan		<ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan penerapan teknologi pengelolaan SDA Menerapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam hal pengawasan pengelolaan SDA 	<p>Ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi prosedur penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan penerapan teknologi pengelolaan SDA</p> <p>Diterapkannya prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam hal pengawasan pengelolaan SDA</p>	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA dalam bentuk penyampaian laporan dan pengaduan	
		Badan Lingkungan Hidup	Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kualitas lingkungan	Ditetapkannya dan terlaksananya sosialisasi prosedur penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kualitas lingkungan			
		Dinas Pertanian TP&H	Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi di jaringan tersier	Ditetapkannya dan terlaksananya sosialisasi prosedur penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi di jaringan tersier			
		Dinas Kesehatan	Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kesehatan	Ditetapkan dan terlaksananya sosialisasi prosedur penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait budidaya pertanian dan pengelolaan SDA terkait kesehatan			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Kehutanan	Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait pengelolaan kawasan hutan / kehutanan	Ditetapkannya dan terlaksananya sosialisasi prosedur penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait pengelolaan kawasan hutan / kehutanan		
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kegiatan industri dan perdagangan	Ditetapkannya dan terlaksananya sosialisasi prosedur penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan pelaku industri dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kegiatan industri dan perdagangan		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan air tanah	Ditetapkannya dan terlaksananya sosialisasi prosedur penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan air tanah		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Menyusun dan menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait budidaya perikanan dan kerusakan pantai	Ditetapkannya dan terlaksananya sosialisasi prosedur penyampaian laporan dan pengaduan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait budidaya perikanan dan kerusakan pantai		
c.	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha		Dinas PSDA	Menganalisis dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya analisis dan tindaklanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha untuk mendapatkan solusi		
			Biro Humas	Mengkoordinasikan tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA	Terlaksananya koordinasi tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA		
			Badan Lingkungan Hidup	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait kualitas lingkungan untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindaklanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait kualitas lingkungan untuk mendapatkan solusi		
			Dinas Pertanian TP&H	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi di jaringan tersier untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindaklanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi di jaringan tersier untuk mendapatkan solusi		
		Menerus	Dinas Kesehatan	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait kesehatan untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindaklanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait kesehatan untuk mendapatkan solusi		
			Dinas Kehutanan	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait pengelolaan kawasan hutan untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindaklanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait pengelolaan kawasan hutan untuk mendapatkan solusi		
			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yg disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait transportasi air	Terlaksananya tindaklanjut laporan dan pengaduan yg disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait transportasi air		
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat dan pelaku industri dalam pengelolaan SDA terkait kegiatan industri dan perdagangan untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindaklanjut laporan dan pengaduan dari masyarakat dan pelaku industri dalam pengelolaan SDA terkait kegiatan industri dan perdagangan untuk mendapatkan solusi		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan air tanah untuk mendapatkan solusi	Terlaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan air tanah untuk mendapatkan solusi		
						Terselesaikannya laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan SDA sesuai dengan skala prioritas	

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait budidaya perikanan dan kerusakan pantai untuk mendapatkan solusi	Tertaksananya tindak lanjut laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA terkait budidaya perikanan dan kerusakan pantai untuk mendapatkan solusi		
d.	Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan SDA		Dinas PSDA	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA	Tertaksananya pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA	Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA	
		Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pelatihan, penguatan kelembagaan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kualitas lingkungan	Tertaksananya pelatihan, penguatan kelembagaan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kualitas lingkungan			
		Dinas Pertanian TP&H	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi di jaringan tersier	Tertaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan budidaya pertanian dan pengelolaan air irigasi di jaringan tersier			
		Dinas Kesehatan	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kesehatan	Tertaksananya pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait kesehatan			
		Dinas Kehutanan	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait pengelolaan kawasan hutan	Tertaksananya pendidikan dan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA terkait pengelolaan kawasan hutan			
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pengawasan pengelolaan air tanah	Tertaksananya pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pengawasan pengelolaan air tanah			
		Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Menyelenggarakan sekolah lapang iklim untuk petani dan petambak garam dalam rangka pengawasan pengelolaan SDA	Terselenggaranya sekolah lapang iklim untuk petani dan petambak garam dalam rangka pengawasan pengelolaan SDA			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
VI	Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam Pengelolaan SDA Terpadu						
1.	Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola SISDA						
a.	Menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi SDA	1 thn stlh Jak Pengel SIH3 di tetapkan	Dinas PSDA	Melaksanakan penataan ulang tugas dan fungsi unit pengelola data dan informasi SDA secara terpadu	Terlaksananya penataan ulang tugas dan fungsi unit pengelola data dan informasi SDA secara terpadu	Tertatanya pembagian tugas unit pengelola data dan informasi SDA	
Dinas Kesehatan			Menyediakan data dan informasi kualitas air minum	Tersedianya data dan informasi kualitas air minum			
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			Mengkaji dan menata ulang tugas dan fungsi unit pengelola data dan informasi hidrogeologi	Terlaksananya penataan ulang tugas dan fungsi unit pengelola data dan informasi hidrogeologi			
Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika			Melaksanakan penataan ulang dan pengaturan unit pengelola data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi	Terlaksananya penataan ulang dan pengaturan unit pengelola data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi			
b.	Meningkatkan ketersediaan anggaran untuk membentuk dan/atau mengembangkan SISDA khususnya mengenai SIH3	Menerus	Dinas PSDA	Menyusun program dan alokasi anggaran yang memadai untuk mengembangkan SISDA	Tersusunnya program dan alokasi anggaran yang memadai untuk mengembangkan SISDA	Meningkatnya ketersediaan anggaran untuk mengembangkan SISDA khususnya SIH3	
Biro Keuangan			Mengkoordinasikan SKPD dan lembaga terkait dalam penyusunan rencana kebutuhan anggaran untuk mengembangkan SISDA	Terkoordinasikannya SKPD dan lembaga terkait dalam penyusunan rencana kebutuhan anggaran untuk mengembangkan SISDA			
Bappeda			Meningkatkan alokasi anggaran terkait SISDA	Meningkatnya alokasi anggaran terkait SISDA			
Badan Lingkungan Hidup			Menyusun program dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA	Tersusunnya program dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan kualitas lingkungan terkait SDA			
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			Menyusun program dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi air tanah	Tersusunnya program dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi air tanah			
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			Menyusun program dan alokasi anggaran untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan sistem informasi dalam pengelolaan SDA	Tersusunnya program dan alokasi anggaran untuk pengumpulan dan penyebarluasan sistem informasi dalam pengelolaan SDA			
Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika			Menyusun program dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi hidrometeorologi dan klimatologi	Tersusunnya program dan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi hidrometeorologi dan klimatologi			
c.	Mengembangkan unit pengelola data dan informasi sumber daya air terpadu	2 thn stlh Jak Pengel SIH3 di tetapkan	Dinas PSDA	Melaksanakan pengembangan unit pengelola data dan informasi SDA terpadu	Terlaksananya pengembangan unit pengelola data dan informasi SDA terpadu	Terbentuk dan berkembangnya unit pengelola data dan informasi SDA terpadu	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			Melaksanakan pengembangan unit pengelola data dan informasi air tanah	Terlaksananya pengembangan unit pengelola data dan informasi air tanah			
Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika			Melaksanakan pengembangan unit pengelola data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi	Terlaksananya pengembangan unit pengelola data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi			
d.	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA	Menerus	Dinas PSDA	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA	Tersedianya tenaga yang trampil dan handal pada setiap unit pengelola SISDA	
Badan Lingkungan Hidup			Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi kualitas lingkungan terkait SDA	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi kualitas lingkungan terkait SDA			
Dinas Kesehatan			Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi kualitas air minum	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi kualitas air minum			
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi Air Tanah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi Air Tanah			
Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika			Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi dan klimatologi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi dan klimatologi			
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan pengumpulan dan penyebarluasan sistem informasi dalam pengelolaan SDA	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan pengumpulan dan penyebarluasan sistem informasi dalam pengelolaan SDA			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
e	Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA	Menerus	Dinas PSDA	1) Melaksanakan sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi SDA bagi masyarakat dan dunia usaha 2) Menyediakan sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA	Terlaksananya sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi SDA bagi masyarakat dan dunia usaha Tersedianya sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi SDA	
		Badan Lingkungan Hidup	1) Melaksanakan sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi lingkungan terkait SDA bagi masyarakat dan dunia usaha 2) Menyediakan sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi lingkungan terkait SDA	Terlaksananya sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi lingkungan terkait SDA bagi masyarakat dan dunia usaha Tersedianya sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi lingkungan terkait SDA			
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1) Melaksanakan sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi SDA bagi masyarakat pelaku industri 2) Menyediakan sarana penerima masukan dari masyarakat pelaku industri dalam pengelolaan data dan informasi SDA terkait industri	Terlaksananya sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi SDA bagi masyarakat pelaku industri Tersedianya sarana penerima masukan dari masyarakat pelaku industri dalam pengelolaan data dan informasi SDA terkait industri			
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1) Melaksanakan sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi hidrogeologi bagi masyarakat dan dunia usaha yang terkait air tanah 2) Menyediakan sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi hidrogeologi	Terlaksananya sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi hidrogeologi bagi masyarakat dan dunia usaha yang terkait air tanah Tersedianya sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi hidrogeologi			
		Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	1) Melaksanakan sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi bagi masyarakat dan dunia usaha 2) Menyediakan sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi	Terlaksananya sosialisasi sistem pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi bagi masyarakat dan dunia usaha Tersedianya sarana penerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi hidrometeorologi dan klimatologi			
2.	Pengembangan Jejaring SISDA						
a	Menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	1 thn sth Jak Pengel SIH3 di tetapkan	Dinas PSDA	Berperanserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA dan Sistem Informasi Air Tanah	Terlaksananya peranserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA dan Sistem Informasi Air Tanah	Berfungsinya lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA dan SIH3 secara optimal	
		Biro Organisasi	Memfasilitasi penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA dan Sistem Informasi Air Tanah	Terfasilitasinya penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA dan Sistem Informasi Air Tanah			
		Badan Lingkungan Hidup	Berperanserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA			
		Dinas Pertanian TP&H	Berperanserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA			
		Dinas Kehutanan	Berperanserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA			
		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berperanserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA			
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Berperanserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA			
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Berperanserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA dan Sistem Informasi Air Tanah	Terlaksananya peranserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA dan Sistem Informasi Air Tanah			
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Berperanserta dalam proses penetapan lembaga dan jaringan komunikasi yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses penetapan lembaga dan jaringan komunikasi yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA			

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Berperanserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Berperanserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA	Terlaksananya peranserta dalam proses penetapan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA		
b.	Membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	1 thn slth Jak Pengel SIH3 di tetapkan	Dinas PSDA	Mengintensifkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama untuk membangun jejaring SISDA dan Sistem Informasi Air Tanah antara instansi, lembaga daerah dan pusat, antarsektor dan antarwilayah	Meningkatnya komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dalam jejaring SISDA dan Sistem Informasi Air Tanah antara instansi, lembaga daerah dan pusat, antarsektor dan antarwilayah	Terwujudnya jejaring SISDA dan SIH3 antara instansi / lembaga, antarsektor dan antarwilayah	
			Bappeda	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah		
			Badan Lingkungan Hidup	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah		
			Dinas Pertanian TP&H	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah		
			Dinas Kehutanan	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah		
			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah		
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA dan Sistem Informasi Air Tanah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA dan Sistem Informasi Air Tanah		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah		
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah	Terlaksananya eranserta dalam proses membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Berperanserta dalam proses membangun jejaring SISDA dan Sistem Informasi Air Tanah	Terlaksananya peranserta dalam proses membangun jejaring SISDA dan Sistem Informasi Air Tanah		
c.	Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SISDA	Menerus	Dinas PSDA	Membangun kesepakatan dan meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	Terbangunnya kesepakatan dan meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SISDA	
			Badan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha terkait lingkungan hidup	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha terkait lingkungan hidup		
			Dinas Pertanian TP&H	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat petani dan dunia usaha pertanian	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat petani dan dunia usaha pertanian		
			Dinas Kehutanan	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha kehutanan	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha kehutanan		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha transportasi air	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha transportasi air		
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat pelaku industri	Meningkatnya kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat pelaku industri		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Membangun kesepakatan dan melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha air tanah dan sumber daya mineral	Terbangunnya kesepakatan dan melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha air tanah dan sumber daya mineral		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Membangun kemitraan dan melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha perikanan	Terbangunnya kemitraan dan melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan SISDA antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha perikanan		
3.	Pengembangan Teknologi Informasi						
a.	Mengembangkan SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional oleh para pemilik kepentingan	Menerus	Dinas PSDA	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA	Dikembangkannya SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional	Diterapkannya SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional	
			Badan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA terkait lingkungan hidup	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA terkait lingkungan hidup		
			Dinas Pertanian TP&H	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat petani untuk mendukung pengembangan SISDA	Terlaksananya sosialisasi masyarakat petani untuk mendukung pengembangan SISDA		
			Dinas Kehutanan	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA terkait pengelolaan kawasan hutan	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA terkait pengelolaan kawasan hutan		
			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA terkait transportasi air	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA terkait transportasi air		
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA terkait sektor industri	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi SISDA terkait sektor industri		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi sistem informasi hidrogeologi	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi sistem informasi hidrogeologi		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan pengembangan sistem informasi geografis (SIG) dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi pendayagunaan SDA di bidang kelautan dan perikanan	Terlaksananya pengembangan sistem informasi geografis (SIG) dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi pendayagunaan SDA di bidang kelautan dan perikanan		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi Sistem Informasi Air Tanah	Terlaksananya pengembangan dan penerapan hasil rancang bangun nasional dalam teknologi Sistem Informasi Air Tanah		
b.	Meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dan SISDA serta memfasilitasi pengoperasiannya	Menerus	Dinas PSDA	Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pemutakhiran data dan informasi	Teralokasinya anggaran yang memadai untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pemutakhiran data	Meningkatnya ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam pengembangan teknologi SISDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya	
			Bappeda	Berperanserta dalam perencanaan alokasi anggaran untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pemutakhiran data dan informasi	Terlaksananya peranserta dalam perencanaan alokasi anggaran untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pemutakhiran data dan informasi		
			Badan Lingkungan Hidup	Mengalokasikan anggaran dan melaksanakan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pemutakhiran data dan informasi	Tersedianya alokasi anggaran dan melaksanakan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pemutakhiran data dan informasi		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Pertanian TP&H	Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pemutakhiran data dan informasi SDA terkait pertanian	Tersedianya alokasi anggaran untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pemutakhiran data dan informasi SDA terkait pertanian		
			Dinas Kehutanan	Mengalokasikan anggaran dan melaksanakan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pemutakhiran data dan informasi	Tersedianya alokasi anggaran dan melaksanakan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pemutakhiran data dan informasi		
			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta memfasilitasi pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi terkait transportasi air	Tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta memfasilitasi pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi terkait transportasi air		
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta memfasilitasi pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi terkait industri	Tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta memfasilitasi pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi terkait industri		
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Mengalokasikan anggaran dan meningkatkan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi hidrogeologi serta pengoperasiannya	Tersedianya alokasi anggaran dan meningkatkan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi hidrogeologi serta pengoperasiannya		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Mengalokasikan anggaran dan melakukan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pemutakhiran data dan informasi terkait kelautan dan perikanan	Tersedianya alokasi anggaran dan melakukan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam SISDA serta pemutakhiran data dan informasi terkait kelautan dan perikanan		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Mengalokasikan anggaran dan melakukan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam Sistem Informasi Air Tanah serta pemutakhiran data dan informasi	Tersedianya alokasi anggaran dan melakukan upaya untuk meningkatkan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam Sistem Informasi Air Tanah serta pemutakhiran data dan informasi data dan informasi		
c.	Memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA		Dinas PSDA	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terbaru (mutakhir)	Terfasilitasinya para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terbaru (mutakhir)		
			Badan Lingkungan Hidup	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi lingkungan hidup terkait SDA	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi lingkungan hidup terkait SDA		
			Dinas Pertanian TP&H	Mendukung penyediaan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terkait pertanian	Tersedianya dukungan penyediaan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terkait pertanian		
		Menerus	Dinas Kesehatan	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terkait air minum	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terkait air minum	Terwujudnya akses data dan informasi SDA dengan mudah bagi para pemilik kepentingan	
			Dinas Kehutanan	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi kondisi hidrologis di kawasan hutan	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi kondisi hidrologis di kawasan hutan		
			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi terkait transportasi air	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi terkait transportasi air		
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terkait sektor industri	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi SDA terkait sektor industri		

No	Kebijakan dan Strategi	Target Waktu	Lembaga Terkait	Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jak SDA	Output	Outcome	Ket
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Menyediakan fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi hidrogeologi	Tersedianya fasilitas bagi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi hidrogeologi		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Memberikan layanan kepada para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi budidaya perikanan	Diterimanya layanan kepada para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi budidaya perikanan		
			Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika	Memberikan layanan kepada para pemilik kepentingan dalam mengakses informasi hidrometeorologi dan klimatologi	Diterimanya layanan kepada para pemilik kepentingan dalam mengakses informasi hidrometeorologi dan klimatologi		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO